PERKEMBANGAN POLITIK ACEH PASCA KONFLIK

(Study Kasus Terhadap Ketertarikan Mahasiswa UIN Ar Raniry Angkatan 2011 Dalam Berpolitik Praktis Pasca MoU Helsinky)

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH :

NUR AZMIATY

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat

Prodi: Aqidah dan Filsafat Islam

Nim: 311 002 780

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR RANIRY

DARUSSALAM – BANDA ACEH

2014 / 1435 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama	: Nur Azmiaty
NIM	: 311002780
Jenjang	: Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi	: Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 13 Juli 2014

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL

6000

Nur Azmiaty

NIM. 311002780

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh :

NUR AZMIATY
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam
NIM : 311002780

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
(Ernita Dewi, S. Ag, M. Hum)	(Nurkhalis, S. Ag., SE., M. Ag)
NIP: 197307232000032002	NIP : 19730326200511003

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Pada Hari / Tanggal : Kamis, 24 Juli 2014
26 Ramadhan 1435 H

Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Ernita Dewi, S. Ag. M. Hum
NIP: 197307232000032002

Sekretaris,

Nurkhalis, S. Ag., SE., M. Ag
NIP : 197303262005011003

Anggota I,

Dr. Fuad Ramli, M. Hum
NIP : 196903151996031001

Anggota II,

Musdawati S. Ag., MA
NIP: 197509102009012002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Damanhuri Basyir, M. Ag
NIP: 196003131995031001

PERKEMBANGAN POLITIK ACEH PASCA KONFLIK (STUDY KASUS TERHADAP KETERTARIKAN MAHASISWA UIN AR RANIRY ANGKATAN 2011 DALAM BERPOLITIK PRAKTIS PASCA MOU HELSINKY)

Nama : Nur Azmiaty
Nim : 311002780
Tebal Skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : Ernita Dewi, S. Ag, M. Hum
Pembimbing II : Nurkhalis, S. Ag., SE., M. Ag

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara singkat peranan Mahasiswa sebagai *agent of change* dan menganalisis akan ketertarikan mahasiswa UIN Ar Raniry dalam memanfaatkan kesempatan sebagai kader suatu partai untuk berpolitik praktis. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tekhnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah *observasi* lapangan, *interview* mendalam, perundang-undangan, serta sumber lainnya yang tertulis guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menggunakan latar belakang politik Aceh paska MoU Helsinky yang berkembang didalamnya sistem partai nasional dan partai lokal yang dikaitkan dengan keaktifan mahasiswa dalam berorganisasi intra-kampus dan ekstra-kampus. Kemudian aktivis mahasiswa intra-kampus yang mendalami edukasi politik yang berhujung pada perekrutan Mahasiswa menjadi kader calon anggota suatu partai. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan saat wawancara, mahasiswa terjun kedunia partai adalah untuk mendalami edukasi politik dan sistem pemerintahan yang kemudian dapat diterapkan dalam politik kemahasiswaan dalam membangun kualitas kampus, dan cara berfikir mahasiswa yang kritis sehingga melahirkan mahasiswa yang independen dan lagi idealis.

Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan sebuah kesimpulan baru bahwasanya ketertarikan mahasiswa untuk berpolitik praktis disebabkan karena adanya kontak langsung dengan elitisi politik maupun aktivis partai yang mempunyai aliansi dengan organisasi mahasiswa baik dalam kampus mapun luar kampus. Keaktifan mahasiswa dalam suatu partai membentuk pola pikir dan karakteristik mahasiwa yang sering bertentangan dengan kebijakan politik kampus.

Kata Kunci: Politik Praktis, Mahasiswa, Edukasi Politik

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti tidak mampu menyelesaikan dari awal sampai akhir tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, peneliti ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Damanhuri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan penulisan penelitian ini.
2. Bapak Lukman Hakim, M. Ag., selaku ketua jurusan Ilmu Akidah dan Filsafat yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan hasil penelitian ini.
3. Ibu Ernita Dewi, S. Ag, M. Hum dan Bapak Nurkhalis, S. Ag., SE., M. Ag., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran serta tidak bosan-bosannya memberikan arahan dan masukan kepada peneliti dalam penulisan hasil penelitian hingga tulisan ini terselesaikan.
4. Segenap bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Ar Raniry yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat peneliti amalkan dalam kehidupan dan masa depan nantinya.
5. Ibunda dan Ayahanda tercinta, yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayangnya, dan tidak pernah jenuh mendorong dan memberikan semangat kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Hendra Musri, Desi Sri Mulyanti, Nur Afla Saputri dan Zya Ul Safira sebagai abang kandung, kakak kandung dan adik-adik kandung peneliti, yang telah meluangkan banyak waktu dan pengertian kepada peneliti dan motivasi sehingga penulisan ini dapat peneliti selesaikan.
7. Ainul Mardhiah dan Khalijah sebagai teman karin peneliti yang selalu menyemangati peneliti dalam susah dan senang sehingga terciptanya semangat yang luar biasa dalam menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini.
8. Teman-teman angkatan 2010 jurusan Akidah dan Filsafat, yang telah mengisi hari-hari perkuliahan peneliti dan memberi banyak warna kehidupan. Maaf tidak dapat menyebutkan nama kalian satu persatu.

9. Pak Hadya Noer selaku pengurus DPW-PPP Aceh, yang telah banyak membantu dan memberikan informasi partai PPP kepada peneliti sehingga penelitian ini tidak terhambat.
10. Pak Rizal Vahlaivi *caleg* Partai Gerindra 2014, yang telah menyumbangkan sedikit ilmu dan informasi mengenai partai dan kemahasiswaan sehingga penelitian ini juga mempermudahkan peneliti dalam menulis.
11. Syauqi Futtaqi sebagai anggota pengurus partai Golkar, yang juga telah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi sehingga penelitian ini selesai.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu penelitian dalam kelancaran mendapatkan informasi dan menulis skripsi ini.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi peneliti sendiri. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Nya dan semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua di dunia ini juga di akhirat. Amin ya rabbal Alamin,..

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN.....ii
ABSTRAK ii
KATA PENGANTAR..... iv
UNGKAPAN TERIMA KASIH v
DAFTAR ISI.....vii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan masalah 10
C. Tujuan penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Tinjauan Pustaka.....11
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 17

BAB II : PPROFIL PROVINSI ACEH
A. Geografi Provinsi Aceh.....19
B. Sejarah Masyarakat Aceh 22
C. Pengaruh Sosiologis Dari Perpolitikan Masa Kerajaan 27

BAB III : PARTAI POLITIK : PARTAI NASIONAL DAN PARTAI LOKAL
A. Partai Politik Perspektif Yuridis 31
B. Perkembangan Partai Politik di Aceh 34
1. Partai Nasional 37
2. Partai Lokal 41

BAB IV : KETERTARIKAN DAN PARTISIPASI MAHASISWA DALAM PARTAI POLITIK
A. Profil Singkat UIN Ar Raniry 47

B. Ketertarikan Mahasiswa UIN Ar Raniry Terhadap Politik Praktis 50
C. Eksistensi Organisasi Mahasiswa dalam Partai Politik 51
D. Pengaruh Elit Partai Terhadap Mahasiswa 54
E. Pola Rekrutmen Partai Politik.....57
F. Posisi Mahasiswa Dalam Partai Politik 62
G. Keterlibatan Mahasiswa Dalam Politik Partai 64
H. Perubahan Karakter Mahasiswa Setelah Berpolitik Praktis.....66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 69
B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Aceh dikenal sebagai lahan perpolitikan yang sangat menarik untuk dipelajari dan dikaji. Hal ini disebabkan oleh perjanjin MoU Helsinki yang telah menjawab doa masyarakat Aceh setelah melalui konflik Aceh yang berkepanjangan. Aceh dikenal dengan daerah yang kental akan agama Islam, adat dan budaya. Wilayah Aceh mempunyai tanah yang subur dan mampu menghasilkan berbagai macam sumber daya alam. Tidaklah heran jika para imperialis seperti Portugis, Belanda dan Jepang tertarik dengan tanah Aceh. Sejarah mencatat bahwa Aceh memiliki peradaban Islam yang luas dan kuat se Asia Tenggara. Provinsi Aceh dikenal sebagai wilayah dimana Belanda tidak pernah memiliki kontrol secara penuh pada masa penjajahan. Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh para kaum ulama dan perbedaan ideologi dengan pemerintah pusat RI telah membuat wilayah ini mempertahankan identitasnya.[1] Sebagai kaum Muslim yang setia, masyarakat Aceh memiliki kebanggaan diri sebagai masyarakat serambi Mekah.[2] Demi memperjuangkan tanah mulia, Aceh harus berhadapat dengan konflik yang berkepanjangan.

Konflik adalah sebuah proses sosial yang terjadi dalam masyarakat yang berbentuk kekerasan dengan tujuan untuk menyingkirkan salah satu pihak yang tidak disenangi dan membuatnya tidak berdaya. Secara umum, munculnya konflik didalam kehidupan masyarakat dilatar belakangi oleh beberapa faktor, seperti factor ekonomi, wilayah, agama, dan hingga faktor

---

[1] Bob Sugeng Hadiwinata dkk, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka: Dari Kotak Peluru ke Kotak Suara*, (Jakarta Selatan: Friedrich Ebert Stiftung, 2010). hal: 113

[2] Aceh Serambi Mekkah karena Aceh sebagai pintu menuju ke jazirah Arab bagi para pelaksana ibadah haji dari seluruh kepulauan pada abad ke 16 dan ke 17. Lihat Bob Sugeng Hadiwinata dkk, *Transformasi*..., hal: 114-115

politik. Faktor-faktor seperti inilah yang menghasilkan sejumlah konflik dan melawan pemerintah. Konflik seperti ini akan berpotensi mengancan keamanam dan kepentingan Negara.[3]

Di Aceh, perang mulai muncul pada abad ke 16 di saat kesultanan Aceh mempertahankan kekuasaannya melawan Portugis sampai Belanda yang membawa konflik berkepanjangan hingga 35 tahun lamanya untuk melengkapi kolonialisasi Hindia Belanda.[4] Konflik ini terjadi disebabkan para kolonialis Belanda ingin menguasai ekonomi Aceh dan wilayah Aceh yang subur akan penghasilan alam termasuk didalamnya rempah-rempah. Sejarah telah membuktikan bahwa pada tahun 1940-an, Aceh mampu memberikan bantuan sumbangan sebuah pesawat untuk pemeritah Indonesia yang saat itu dibawah pimpinan Sukarno dan Mohammad Hatta.

Sumbangan rakyat Aceh yang diserahkan kepada Indonesia tersebut berasal dari hasil keringat masyarakat Aceh yang bertani, berkebun, berdagang dan hingga mereka para saudagar Aceh. Hubungan Aceh dan pemerintah pusat semakin membaik ditengah-tengah panjangnya masa penjajahan Belanda saat itu. Sebagai satu-satunya wilayah yang susah untuk ditaklukkan oleh Belanda, Maka Sukarno meminta Aceh untuk menjadi bagian dari pada NKRI dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari jajahan Belanda.

17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kampanye tentang Indonesia di forum Internasional mulai meluas dan Indonesia pun mendapat pengakuan dunia.[5] Namun kemerdekaan tersebut tidak bertahan lama untuk rakyat Aceh sebagai salah satu wilayah daripada NKRI. Aceh harus menghadapi *issue* konflik baru dengan pemerintah pusat karena

---

[3] John T Ishiyama, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu Jilid I*, (Jakarta: Kencana, Cet II, 2013). hal: 405

[4] Aguswandi, *Rekonfigurasi Politik: Proses Perdamaian Aceh,* (London: Conciliation Resources, 2008). hal: 7

[5] Amran Zamzami SE, *Jihad Akbar di Medan Area,* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990). hal: 314

tidak menunaikan kesepakatan yang pernah dibuat antara Aceh dan RI sebelum merdeka. Soekarno yang menjabat sebagai presiden saat itu belum juga memberikan hak rakyat Aceh yang pernah disepakati dengan gubernur militer Aceh Teungku Muhammad Daud Beureueh tentang pendidikan, budaya, dan syariat Islam. Maka, dengan penuh kekhawatiran akan punahnya aturan Islam, Ulama Islam Aceh yang paling berpengaruh saat itu mendukung pemberontakan bersenjata terhadap RI.[6] Disinilah awal mula lahirnya konflik antara Aceh dan NKRI yang kemudian melibatkan banyak masyarakat Aceh hingga menjadi korban kekerasan, Pelecehan seksual, hingga HAM.

Tahun 1970-an, ketidakpuasan Aceh muncul kembali karena Soeharto tidak memenuhi harapan-harapan rakyat Aceh terkait pemulihan pelaksanaan syariat Islam sebagai kekuatan sosial-politik yang dominan.[7] Merasa dikibuli oleh pemerintah RI, aceh pun tak gentar dan terus berjuang melawan RI.

Gerakan-gerakan Aceh melawan RI pun lahir di Aceh. Salah satunya GAM atau yang dikenal dengan sebutan Gerakan Aceh Merdeka. Kekerasan atas ekpansi perlawanan yang dilakukan oleh GAM membuat pemerintah pusat marah hingga kemudian Jakarta meluncurkan operasi anti-pemberontakan skala besar untuk melawan Aceh. Sehingga secara resmi Aceh menjadi wilayah DOM atau daerah operasi Militer yang dipahami sebagai bentuk penerapan darurat militer selama satu dekade. Selama berjalannya darurat militer di Aceh, maka ribuan masyarakat Aceh menjadi korban jiwa.

Kepemimpinan Soeharto telah memberi luka yang mendalam pada rakyat Aceh dan juga masyarakat Indonesia. Sistem kepemimpinannya yang terlalu otoriter membuat masyarakat

---

[6] Aguswandi, *Rekonfigurasi Politik*..., hal: 8
[7] Aguswandi, *Rekonfigurasi Politik*..., hal: 14

marah, hingga aktivis-aktivis Indonesia melakukan perlawanan dengan menggulirkan rezim Soeharto dan menaikkan Bj. Habibi. Era reformasi telah dimulai, dan kehidupan masyarakat sudah mulai sedikit terbuka dengan pemimpin. Ketenangan sudah mulai sedikit terlihat di Aceh karena BJ. Habibi telah membuat sebuah keputusan akan penerapan syariat Islam di Aceh, pencabutan DOM dan mempererat silaturrahmi dengan masyarakat Aceh guna memulihkan luka Aceh yang belum kunjung sembuh.[8]

Dalam agenda sidang tahun 1999 DPR pusat, anggota DPR mempertimbangkan bahwa masyarakat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat dan menempatkan ulama sebagai peran yang paling terhormat dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, maka lahirlah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dalam pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan akan penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.[9] Tidak hanya masalah syariat Islam, BJ Habibie juga mengizinkan rakyat Aceh untuk melakukan aksi Referendum sebagai suatu wujud keadilan, demokrasi dan penyelesaian masalah.[10]

Jalan menuju perdamaian mulai terlihat sudah, ketika Habibi mampu menyembuhkan luka rakyat Aceh. Namun perdamain di Aceh tidak mungkin lahir begitu saja setelah Habibie penyelenggarakan wilayah Aceh sebagai provinsi Istimewa Aceh.[11] Masih banyak hal yang harus ditempuh oleh Aceh untuk menciptakan wilayah yang aman dan berkembang nantinya. Dimana Aceh kembali mengalami konflik dengan RI karena Aceh (GAM) kembali merasa dikhianati.

---

[8] Alwahadi Ilyas, *Aceh Serambi Mekkah*, (Banda Aceh, Pemerintah Prov NAD: 2008). hal: 357

[9] Alwahadi Ilyas, *Aceh Serambi*..., hal: 358

[10] Aguswandi, *Rekonfigurasi Politik*..., hal: 8

[11] Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini kemudian berubah menjadi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2001 dan kemudian berubah lagi menjadi provinsi Aceh pada tahun 2009.

Pelaksanaan Daerah Operasi Militer Aceh yang ke II ini kembali menorah luka yang berkepanjangan pada Aceh. Operasi militer ini bertujuan untuk menghancurkan geraka separatis Aceh yang menurut RI adalah gerakan yang akan menghancurkan tujuan RI (GAM tetap berkomitmen untuk berpisah dengan RI dan ingin membangun negaranya (ACEH) sendiri). Pelanggaran HAM kembali meningkat selama operasi militer ini berlangsung. Banyak perempuan menjadi korban kekerasan dan seksualitas anggota TNI, dan juga anak-anak yang dibunuh hidup-hidup dan hingga memanipulasi proses pembunuhan masyarakat Aceh hingga tidak terdata.[12]

Tahun 2004, jalan menuju perdamaian kembali terlihat pasca bencana Tsunami di Aceh. Disinilah kesempatan besar para pemuka GAM untuk mendeklarasikan kemerdekaannya dengan memanfatkan lingkup Internasional dalam menangani kasus konflik di Aceh yang berkepanjangan. Akibat bencana ini, Aceh menjadi sorotan Negara luar dan bantuan dari berbagai Negara mulai berdatangan. Saat itu juga, GAM mendeklarasikan gencatan sejata secara sepihak di Finlandia. Namun berita itu diketahui oleh presiden RI saat itu bapak SBY yang kemudian langsung mengirimkan tim perunding untuk bertemu dengan para pemimpin GAM di perasingan di CMI (Crisis Management Initiative) atau yang dikenal dengan sebutan Inisiatif Pengelolaan Krisis.[13] Disanalah RI dan GAM membuat kesepakatan berdamai dan tidak ada lagi konflik antara RI dan GAM.

Pasca terlaksananya MoU Helsinky, Aceh telah memiliki wadah baru untuk mengembangkan wilayahnya. Kebebasan masyarakat Aceh dalam memajukan Aceh dapat dilihat pada peluang munculnya calon legislatif (*caleg)* yang semakin pesat di aceh melalui partai

---

[12] Aguswandi, *Rekonfigurasi Politik...*, hal: 19
[13] Aguswandi, *Rekonfigurasi Politik...*, hal: 21

nasional maupun partai lokal. Tidak hanya itu, para pengurus partai juga mulai merekrut mahasiswa sebagai kader aktivis partai tertentu sehingga terbentuknya mahasiswa yang tidak *independent* lagi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa peranan mahasiswa dibangku perkuliahan adalah untuk menyeimbangkan keadilan yang tidak segaris yang berkembang dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan.

Lahirnya mahasiswa-mahasiswa yang fanatik 'buta' dengan partai yang didukungnya mencerminkan kurang kritisnya cara pandang mahasiwa dengan pergejolakan politik Aceh yang kian tidak stabil setiap menjelang pemilu. Sebagai mahasiswa yang idealis haruslah independen dalam menilai perkembangan situasi dan kondisi politik Aceh. Karena pada hakikatnya Aceh membutuhkan pemuda-pemuda yang berkualitas untuk memperbaiki bangsa. Karena pemuda mahasiswa adalah salah satu bagian dari pada generasi perubahan yang akan memimpin dan memperbaiki Aceh.

Maka terlihat jelas mengapa perdamaian Aceh bisa tercapai setelah sekian lama berperang dan menjatuhkan puluh ribuan korban di Aceh. Dimana tercapainya sebuah perdamaian di Aceh dilatar belakangi oleh aksi perdamaian yang jelas dan tawaran-tawaran antara RI-GAM yang beralasan. Kemudian tuntutan hukum atas para aktivis GAM akan dihapuskan dan mereka (GAM) yang mengasingkan diri di luar negeri telah diperbolehkan kembali lagi ke bumi kelahirannya. Tanggal 15 Agustus 2005 telah menjadi sejarah bagi rakyat Aceh sebagi hari terlaksananya perdamaian Aceh dan RI setelah Aceh melewati peperangan puluhan tahun dengan Indonesia. Sehingga pasca MoU, Perkembangan perpolitikan di Aceh membawa dampak positif bagi rakyat Aceh itu sendiri. Namun yang menjadi kendala adalah *perekrutan* mahasiswa yang sangat berlebihan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu hanya untuk memperoleh suara partai mereka.

Di sepanjang tahun 2007 dan 2008, perhatian lebih fokus terkait dengan bagaimana kaidah-kaidah sebuah partai politik dan persiapan penyelenggaraan pemilihan umum. Masyarakat Aceh harus disiapkan untuk mengambil bagian penting dalam proses demokratisasi melalui pemilu 2009. Mereka yang terpilih dalam pemilu 2009 berasal dari beragam partai politik termasuk dari Partai Aceh, Partai SIRA, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan partai-partai nasional ataupun lokal yang lain.[14]

Partai politik jelas akan menjadi pilar dalam membangun sistem dan kehidupan poltik yang demokratis, disamping itu tentu saja sebagai sarana yang terstruktur dalam menyampaikan dan memperjuangan kepentingan masyarakat atau kelompok yang dalam masyarakat agar diakomodasikan dalam proses pembuatan kebijakan atau proses politik. Hal ini dimaksudkan untuk disadari oleh partisipan yang akan melibatkan diri dalam kehidupan politik pasca angkat senjata.[15]

Pada penelitian inilah, peneliti ingin meneliti perkembangan politik Aceh pasca MoU. Peneliti memilih mahasiswa UIN Ar Raniry sebagai study kasus terkait ketertarikan mahasiswa untuk berkecimpung dalam dunia politik dari berbagai partai politik lokal. Banyak hal yang ingin lebih di eksplor oleh peneliti untuk melihat dan mendefinisikan tentang perkembangan politik Aceh saat ini. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui secara langsung kinerja sebuah partai politik dalam mengembangkan Aceh dan juga merekrut kader (mahasiswa) baru untuk aktif dalam dunia perpolitikan.

---

[14] Bob Sugeng Hadiwinata dkk, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka...*, hal: 157-158

[15] Bob Sugeng Hadiwinata dkk, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka...*, hal: 173

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagaimanakah ketertarikan mahasiswa angkatan 2011 terhadap perkembangan politik Aceh pasca konflik di Aceh?
b. Bagaimanakah pengaruh politik Aceh pasca konflik terhadap karakter mahasiswa pada politik partai di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian adalah:

a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara singkat tentang peranan mahasiswa sebagai *agent of change* di kampus UIN Ar Raniry
b. Menganalisis akan keterkaitan mahasiswa dalam berpolitik dan bagaimana memanfaatkan MoU untuk mewujudkan perkembangan politik Aceh yang lebih baik.

D. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang hendak dicapai, maka sebuah penelitian haruslah mempunyai manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Praktis

   Bagi peneliti khususnya dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan sebuah tulisan hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sendiri. Dan bagi masyarakat Aceh khususnya Mahasiswa UIN Ar Raniry, penelitian ini dapat memberikan penjelasan praktis dalam proses keterlibatan mahasiswa sebagi *agent* perubahan yang mungkin akan mampu membangun Politik Aceh ke arah yang lebih baik lagi.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi untuk perkembangan politik di Aceh pasca MoU yang akan terus berkembang dan memberikan peranan penting dalam masyarakat dalam membangun Aceh dan bahkan mampu menjadi contoh sebagai perpolitikan yang baik sesuai aturan agama dan negara untuk seluruh kota dan provinsi se-Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang peneliti melakukan penelitian melalui berbagai sumber, maka peneliti menemukan beberapa sumber yang layak untuk peneliti gunakan sebagai petunjuk dalam penulisan hasil penelitian. Sumber-sumber tersebut adalah:

Amran Zamzami SE, *Jihad Akbar di Medan Area*.[16] Dalam buku ini membahas akan biografi tgk Daud Bereueh dari masa kecilnya hingga menjadi pemimpin perang Aceh. Dimana Tgk Daud Bereueh menjadi aktor utama yang diceritakan didalam buku tersebut. Selain itu menjelaskan tahap-tahap perjalanan menuju Indonesia Merdeka dan juga sejarah Aceh pada saat terjadinya negosiasi dengan Jakarta

Alwahadi Ilyas, *Aceh Serambi Mekkah*[17]. Buku ini juga memaparkan tentang sumber kekuatan orang Aceh yang berpegang pada syariat. Kemudian juga menjelaskan keadaan Aceh pasca proklamasi, orde lama, orde baru hingga permasalahan penerapan DOM yang berjalan hingga 10 tahun (1989-1998) lamanya yang menyebabkan Aceh hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan.

---

[16] Amran Zamzami SE, *Jihad Akbar di Medan Area*, (Jakarta:PT Bulan Bintang, 1990).
[17] Alwahadi Ilyas, *Aceh Serambi Mekkah*, (Banda Aceh, Pemerintah Prov NAD: 2008).

Teungku Jakobi AK, *Aceh Daerah Modal (Long March ke Medan Area)*.[18] Dalam buku ini menjelaskan situai Aceh saat dimasuki oleh penjajah Belanda, Jepang, hingga Portugis. Selain itu juga menggambarkan jalan perjuangan Aceh saat melawan penjajahan.

Apridor, *Tsunami Aceh Azab atau Bencana.*[19] Buku ini menjelaskan kisah pilu rakyat Aceh saat diguncang oleh Tsunami pada Desember 2004 silam. Bencana ini juga menjadi sebab dalam penyelesaian konflik Aceh yang sempat menegang dalam beberapa *decade.*

John T. Ishiyama, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu* jilid I.[20] Buku ini terjemahan dari *21st Century Political Science: A Reference Handbook* yang diterjemahkan oleh Ahmad Fedyani Saifuddin. Buku ini menjelaskan tentang teori-teori dasar politik, konflik, gerakan separatis, psikologi politik hingga sejarah partai politik yang dijelaskan oleh para peneliti asing.

Aguswandi dan Judith Large, *Rekonfigurasi politik: Proses Perdamaian Aceh.*[21] Pada artikel ini menjelaskan bagaimana perjalanan perdamaian di Aceh yang sejak lama telah tenggelam dalam konflik antara GAM dan RI hingga menemukan jalan tengah melalui nota kesepahaman yang dilakukan di Helsinki.

---

[18] Teungku Jakobi AK, *Aceh Daerah Modal (Long March ke Medan Area)*, (Jakarta: Selawah RI-001, 1992).

[19] Apridor, *Tsunami Aceh Azab atau Bencana*, (Jakarta Timur: Al-Kausar, 2005).

[20] John T Ishiyama, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2013).

[21] Aguswandi, *Rekonfigurasi Politik: Proses Perdamaian Aceh*, (London: Conciliation Resources, 2008).

Firmanzah, Ph. D, *Mengelola Partai Politik*.[22] Buku ini memberikan pemahaman tentang bagaimana partai politik dan politisi membangun pondasi dan dasar berpolitik dalam kerangka persaingan politik diera demokrasi.

Hasan Basri M Nur, *Parnas vs Parlok : Pertarungan Partai Politik Dalam Menguasai Aceh.*[23] Buku yang menyajikan politik Aceh dalam dimensi 3 in 1; akademisi, aktivis dan pimpinan parpol.

Berdasarkan beberapa sumber yang telah peneliti dapatkan, maka peneliti tidak menemukan judul pembahasan yang sama dengan apa yang akan peneliti teliti. Yaitu *Perkembangan Politik Aceh Pasca Konflik (Study Kasus Terhadap Ketertarikan Mahasiswa UIN Ar Raniry Angkatan 2011 Dalam Berpolitik Praktis Pasca MoU Helsinky).* Maka dari itu penelitian ini layak peneliti lakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian statistic termasuk persoalan-persoalan yang dirumuskan, tetapi hanya memberikan gambaran yang mendalam tentang permasalahan tersebut sesuai dengan data yang didapatkan dilapangan dan penafsiran peneliti. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah sebuah metode yang menggunakan penelitian dengan cara meneliti suatu status kelompok manusia, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa lalu.

---

[22] Prof. Firmanzah, Ph. D, *Mengelola Partai Politik,* (Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

[23] Hasan Basri M Nur, *Parnas vs Parlok: Pertarungan Partai Politik dalam Menguasai Aceh*, (Banda Aceh: GAMNA Publishing, 2014).

Metode deskriptif mengarahkan peneliti untuk menjelaskan gambaran yang mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

Sedangkan metode kualitatif adalah penelitian yang membutuhkan data dalam bentuk informasi, komentar dan ditinjau dari suatu kasus, fenomenologi dan hingga kesejarahannya. Sehingga hasil penelitian ini akan bersifat berubah-ubah sesuai kondisi lapangan dan kasus yang berkembang. Tujuan metode penelitian deskriptif kualitatif ini untuk menganalisa hasil dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti yang bersifat akurat dengan fakta-fakta yang ada dan berhubungan dengan fenomena-fenomena yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan oleh peneliti di kampus UIN Ar Raniry. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 30 Juni 2014.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data khusus (*primer)* dan data sekunder. Dimana kedua model data ini sangat bermanfaat bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

a. Data Khusus (*primer)*

Data primer adalah data yang secara langsung peneliti dapatkan dari sumbernya yang peneliti lakukan melalui proses wawancara dari sumber informasi yang terpilih dan juga observasi lapangan yang telah peneliti lihat secara langsung kebenarannya. Jadi, untuk memperoleh sumber yang *real*, peneliti memilih mahasiswa UIN Ar Raniry sebagai objek penelitian.

b. Data Sekunder (Umum)

Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh tidak secara langsung dari sumbernya. Melainkan peneliti peroleh dari hasil catatan-catatan tertulis dan artikel-artikel yang membahas akan *issue* perpolitikan di Aceh. Selain itu, juga dokumen-dokumen data Aceh yang menggambarkan akan konflik, MoU, gerakan sosial di Aceh, partisipasi politik masyarakat pasca MoU serta keadaan Aceh setelah dipimpin oleh pemuda-pemuda yang berpengaruh pada era konflik Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan yang bersifat *Field research* (Study Lapangan). Teknik *Field Research* yang dilakukan dalam penelitian ini melalui 2 metode, yaitu:

1) Observasi Lapangan (Pengamatan)

Observasi lapangan dalam penelitian ini digunakan agar peneliti mampu mengamati secara langsung proses perkembangan politik Aceh pasca MoU dan peran mahasiswa dalam berpolitik setelah menjadi kader politik sehingga mempermudahkan peneliti dalam mengamati kasus yang ada dilapangan penelitian.

2) *Dept Interview* (Wawancara Mendalam)

Wawancara mendalam dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data sedalam-dalamnya mengenai perkembangan politik Aceh pasca konflik dan ketertarikan Mahasiswa dalam berpolitik. Untuk memperoleh informasi yang sangat mendalam dan menyeluruh, maka

wawancara ini dilakukan oleh peneliti bersifat terbuka dan tidak terlalu formal. Sehingga mempermudah peneliti untuk memperoleh informasi, pandangan, pengetahuan, dan pengalaman tentang politik Aceh.

5. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan mengorganisasi data, menguraikan data menjadi unit lebih kecil, melakukan sintesis diantara data, mencari pola-pola hubungan dan interaksi di antara data, menemukan data yang penting yang harus didalami dan akhirnya menentukan apa saja yang perlu ditulis dalam penelitian ini.

Dalam analisa data ini digunakan beberapa cara:

a. Analisis Isi

Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Penelitian ini menggunakan analisis ilmiah tentang isi (pesan) sutau komunikasi secara sistematis dan objektif dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik pesan atau data yang hendak dikaji.

b. Analisis Kritis.

Penelitian dilakukan secara mendalam dan hati-hati terhadap informasi atau data lain yang telah berkembang sebelumnya. Dengan cara ini, sangat mungkin ditemukan informasi baru dan tidak mustahil bertabrakan dengan informasi lama. Dengan analisi ini akan mempermudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi yang berkembang mengenai perkembangan politik partai di Aceh dan ketertarikan mahasiswa UIN Ar Raniry dalam berpolitik praktis.

G. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini akan dijelaskan dalam empat bab penyajian data dan satu bab sebagai penutup yang secara garis besar akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan menyajikan gambaran umum profil provinsi Aceh, geografi masyarakat Aceh, dan pengaruh sosiologis dari perpolitikan masa kerajaan Aceh.

Bab III akan menjelaskan partai politik, kemudian partai politik perspektif yuridis, perkembangan partai politik di Aceh yang kemudian dijelaskan dalam dua sub pembahasan, yaitu partai nasional dan partai lokal.

Bab IV juga dijelaskan tentang partisipasi mahasiswa dalam partai, profil singkat universitas Islam Negri Ar Raniry, eksistensi organisasi mahasiswa dalam partai politik, pengaruh elit partai nasionalis, pola rekrutmen partai politik, posisi mahasiswa dalam partai politik, dan keterlibatan mahasiswa dalam politik partai.

Bab V adalah paparan secara keseluruhan hasil kesimpulan penulisan penelitian yang diakhiri dengan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan tentang hasil pembahasan dan saran menguraikan tentang hal-hal yang sifatnya masukan dari hasil penelitian.

BAB II

PROFIL PROVINSI ACEH

A. Geografi Provinsi Aceh

Aceh terletak di ujung utara pulau sumatera, dibagian paling barat negara republik indonesia. Terletak 95°-98° bujur timur dan 2^{0}-6° lintang utara. Daerah yang terletak sangat strategis ini diapit oleh jalur penerbangan dan pelayaran Indonesia secara geografis yang meliputi sebelah utara berbatasan dengan dengan selat malaka, sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka.[24]

Luas wilayah Aceh sampai 57.365,57 Km^2 atau 5.736.557 ha. Secara keseluruhan luas wilayah Aceh terdiri dari perkotaan, perkampungan, sungai, danau, hutan, are pertanian, rumput, pegunungan, daratan dan kepulauan. Pada sensus nasional terakhir tahun 2005 penduduk Aceh sendiri mencapai 4.031.589 jiwa.[25]

Terbentuknya wilayah Aceh tidak terlepas dari sejarah konflik yang berkepanjangan yang dimulai sejak terpecahnya kelompok ulama dan hulubalang hingga pada konflik antara Aceh dan RI.[26] Konflik inilah yang memicu semangat rakyat Aceh untuk mendapat pengakuan wilayahnya dan melahirkan provinsi Aceh yang dulunya disebutkan sebagai provinsi Daerah Istimewa Aceh. Lahirnya Provinsi Aceh pada tanggal 26 Mei 1959 merupakan tonggak sejarah dari

---

[24] Muhammad Umar, *Darah dan Jiwa Aceh Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2002). hal: 1-2

[25] Aguswandi, *Rekonfigurasi Politik...*, hal: 7

[26] Aguswandi, *Rekonfigurasi Politik...*, hal: 27

perkembangan masyarakat Aceh sejak tahun 1950-an yang diawali dengan pergolakan berdarah menuju ke zaman pembaharuan dan zaman kemajuan.[27]

Pembentukan provinsi Aceh (Daerah Istimewa Aceh) secara formal dituangkan dalam Surat Keputusan Perdana Menteri RI tanggal 26 Agustus 1959 No. 1 / Missi / 1959. Kemudian diperkuatkan lagi dalam pasal 18 UUD 1945 yang rumusannya padat dan berbunyi sebagai berikut.

"…. Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UU dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat Istimewa."[28]

Tata cara atau sistem pemerintahan Aceh itu sendiri sejak tingkat provinsi, kabupaten sampai kecamatan dan desa, pada umumnya sama seperti wilayah lain. Terdiri dari *gampong* (desa) yang dikepalai oleh kepala desa, dan kemudian adanya kepala dusun (khusus di pedesaan) dan kepala lingkungan (kepala lorong) di perkotaan.[29] Selain pemerintah yang formal seperti kebanyakan desa-desa yang lain, Aceh juga memiliki pemimpin informal yang menjadi panutan masyarakat seperti *tuha peut, tuha lapan*[30] yang terdiri dari imam masjid, khatib, bilal, *teungku*

---

[27] SH Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latar belakang politik dan masa depannya,* (Jakarta: PT. Citra Panca Serangkai, 1993). hal: 177

[28] SH Hardi, *Daerah Istimewa Aceh...,* hal: 179

[29] Muhammad Umar, *Darah dan Jiwa Aceh...,* hal: 3-4

[30] Petuah empat nama lain dari unsur pemerintahan yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan. Lihat pada Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Bab 1 ketentuan Umum, Pasal 1 angka 18. Sedangkan petuah delapan adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imum mukim dan keuchik. Lihat pada pada Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Bab 1 ketentuan Umum, Pasal 1 angka 20.

sagoe, tokoh masyarakat yang cerdik dan pandai. Dan tidak lupa pula di setiap wilayah aceh umumnya daerah perkampungan terdapat *meunasah.*[31]

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 2 tahun 1990 telah ditetapkan pembinaan dan penegmbangan adat istiadat. Didalamnya terdapat ketentuan lembaga adat yang terkait tentang pembinaannya yaitu, Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Aceh No. 430 atau 543 atau 1986. Dengan tujuan menggali kembali, memelihara, melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya Aceh sesuai dengan perkembangan zaman.[32]

Aceh sendiri tidak dapat dipisahkan dari budaya, adat, dan syariat Islam yang terus berkembang sesuai dengan peninggalan atau warisan leluhur Aceh pada masa kejayaannya. Seperti yang sangat dikenal oleh masyarakat dengan kalimat "*Adat bak Po Teumeuruhom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana*".[33]

B. Sejarah Masyarakat Aceh

Aceh adalah sebuah wilayah yang dikenal dengan kentalnya syariat Islam tidak terlepas dari sejarah masuknya islam pertama di wilayah ini. Ada pun kedatangan dan penyebaran Islam di Aceh melalui beberapa fase. Proses Islamisasi itu sendiri tercatat melalui berbagai jalur seperti jalur perdagangan, pernikahan, memasuki birokrasi, sufisme, pendidikan (pesantren), dan

---

[31] *Meunasah* adalah kata yang berasal dari bahasa arab, yang mempunyai makna *madrasah* yang difungsikan sebagai tempat beribadah, tempat bermusyawarah dan tempat pendidikan.

[32] Muhammad Umar, *Darah dan Jiwa Aceh...*, hal: 5-7

[33] Populernya kalimat "*Adat bak Po Teumeuruhom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana*" dilatar belakangi oleh puncak kejayaan Islam dibawah kerajaan Aceh darussalam yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda dan juga sang Qadhi yang bijaksana yang menerapkan hokum sesuai hukum Allah. Lih. Muhammad Umar, *Darah dan Jiwa Aceh...*, Hal: 33-40 dan juga Lih. Dra. Hj. Emi Suhaimai, *Wanita Aceh dalam Pemerintahan dan Peperangan*, (Banda Aceh: CV. Gua Hira, 1993). hal: 9.

kesenian.[34] Pun demikian, Islam di Aceh telah muncul sejak paroh abadpertama ke-7 H / ke 13 M. Hal ini diketahui lewat data-data yang diperoleh tiga baru nisan yang bersurat yang ditemukan di kawasan Lebok Tuwe, Meurah Mulia dan Matng Ulim Kabupaten Aceh Utara. Didalam ketiga nisan tersebut memuat keterangan tentang pemilik kubur yang menjelaskan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang syahid serta dicintai oleh orang banyak. Tercatat bahwa mereka meninggal pada pada tahun 622 H / 1226 M dan tanggal 676 H / 1278 M.[35]

Penemuan batu nisan tersebut menandakan Islam telah berkembang lebih dahulu di Aceh setara dengan puncak kejayaan Islam pada masa Dinasty Abbasiyah yang pada akhirnya runtuh pada tahun 1258 akibat serangan raja Mongol. Keberadaan nisan tersebut juga terbukti bahwa kepemerintahan Islam di pesisir utara Aceh telah muncul sejak pertengahan pertama abad ke 7 dan merupakan awal dari sejarah Samudra Pasai. Tercatat bahwa pada *epitaf* nisan yang ditemukan pada kitaran abad ke 7 tersebut menginformasikan bahwa mereka adalah “as-sa’id” yang bermaknakan bahwa mereka adalah penguasa sebelum Al Malik Ash Shalih dan dinastinya memerintah di Samudra Pasai.[36]

1. Kerajaan Aceh

Kerajaan yang terletak di Aceh yang didirikan oleh Meurah silu pada tahun 1267 M merupakan kerajaan yang pernah jaya sebelum adanya kerajaan Aceh Darussalam. Pada masanya, kerajaan ini merupakan pusat perniagaan yang ramai dikunjungi oleh para saudagar dari beberapa negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Sebagai bandar perdagangan

---

[34] H. Uka Tjandrasasmita, *Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia*, (Bogor, 2007). hal: 4
[35] CISAH, *Tinggalan Sejarah Samudra Pasai*, (Lhokseumawe, 2014). hal: 1
[36] CISAH, *Tinggalan Sejarah...*, hal: 2-3

yang besar, samudera Pasai juga mengeluarkan mata uang emas yang disebut *dirham.* Uang ini digunakan secara resmi sebagai alat tukar pada masa kejayaan Samudera Pasai.

Sebagai kerajaan besar di kawasan Pasai, kerajaan ini berhasil menghasilkan sebuah karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas yang kreatif berhasil memanfaatkan huruf arab yang dibawa oleh agama Islam, yang kemudian dimanfaatkan untuk menulis bahasa melayu yang kemudian tulisan ini disebutkan dengan nama kitab arab jawi.

2. Perang Aceh

Berkepanjangannya perang dan konflik Aceh tidak terlepas dari serangan Belanda saat memasuki wilayah Aceh dan ingin menguasainya. Sebagai wilayah yang belum dikuasai penuh oleh penjajah, Aceh menjadi wilayah modal untuk membuka pintu gerbang kemerdekaan.

Ketika Belanda masih menduduki wilayah Serambi Mekkah pelbagai cara dilakukan oleh Belanda untuk merebut wilayah Aceh. Karena dalam menghadapi Islam di Indonesia-Aceh khususnya, pemerintah Hindia-Belanda bekerjasama dengan para kepala adat, dan menggunakan lembaga adat untuk membendung pengaruh Islam di kepulauan Nusantara. Belanda mengadakan ikatan-ikatan politk dan perdagangan dengan raja-raja Aceh dan para *uleebalang* untuk menjalin hubungan baik. Membuat kontrak politik dengan mengakui kekuasaan para raja dan *uleebalang.*[37]

Sejak abad ke 16 Aceh diketahui sebagai negara Islam besar yang tergiring dalam medan perang menghadapi negara-negara penjajah. Keterlibatan dalam perang menyebabkan kecerdasan anak negeri yang pernah maju menjadi buntu dan tertinggal jauh. Para intelektual

[37] Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Aceh Serambi Mekkah*, (Banda Aceh: CV. Citra Kreasi Utama, 2008). hal: 315

menyadari akan keterbelakangan anak Aceh dapat mengakibatkan Aceh mundur dan kalah dari serangan penjajah. Maka mereka mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan mendidik dan membangun sebuah negeri yang memiliki kekuatan fisikal (nilai spiritual) yang lebih mantap.[38]

Melihat gejolak melawan penjajahan yang semakin meluas di seluruh Indonesia, maka organisasi yang telah dibentuk untuk anak negri Aceh mengundang pihak Jepang untuk memasuki Aceh dengan tujuan Jepang bisa mengusir Belanda dari Tanah Air.[39]

Cita-cita Aceh terbesar saat itu adalah merebut kemerdekaan dari para penjajah begitu pula daerah Indonesia. Cita-cita itu terwujud begitu cepat dari perkiraan orang-orang Aceh karena tentara Jepang terpaksa menyerahkan senjata pada *gunco* dan *sunco*[40] pada penguasa eksekutif di wilayah masing-masing. Penyerahan senjata tentara Jepang dikarenakan Amerika telah melakukan engeboman di wilayah Hiroshima dan Nagasaki, Jepang.

Kembalinya tentara Jepang dan berhasilnya mengusir Belanda menjadi peluang emas kemerdekaan tersendiri bagi kaum pejuang. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno mengumumkan kemerdekaan Indonesia dengan membacakan teks singkat proklamasi di jalan pegangsaan Timur.

---

[38] Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Aceh Serambi*..., hal: 319

[39] Organisasi Islam yang lebih dikenal dengan nama PUSA mengundang Jepang karena pada saat itu Jepang telah berada dikawasan Malaka. Seperti yang dikemukakan oleh Hasan Saleh bahwa dalam bulan Desember 1941, Tgk Daud Bereueh sebagai ketua pengurus PUSA, Tgk Abdul Wahab Seulimum sebagai anggota dan kepala cabang PUSA Aceh Raya, Teuku Nyak Arif sebagai panglima sagi XXVI, Teuku M. Ali Panglima Polem sebagai panglima sagi XXII mukim, dan Teuku Ahmad sebagai uleebalang Jeunib mengadakan pertemuan di rumah T. Nyak Arid di Lamnyong. Dalam pertemuan itu mereka berjanji dan bersumpah setia kepada agama Islam, kepada bangsa dan Tanah Air, seraya memutuskan untuk bekerjasama dengan Dai Nippon melawan pemerintah Belanda. Mereka menyusun pemberontakan atas nama PUSA. Lihat pada buku Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Aceh Serambi*..., hal: 320

[40] Kalangan feodal yang diberikan jabatan oleh Jepang untuk menjadi pegawai rakyat di daerah masing-masing dalam rangka mengawasi dan menjaga senjata. Mereka dipercayai Jepang karena telah berpengalaman dalam mengatur rakyat.

Kendati kemerdekaan telah diproklamirkan dan Aceh memasuki bahagian NKRI, maka tidak semuanya rakyat Aceh bahagia mendengar berita tersebut. Hal ini disebabkan faktor perjuangan pejuang Aceh yang berjuang keras melawan dan mengusir penjajah dengan maksud Aceh ingin membangun negara sendiri. Sejauh perjuangan yang dilakukan pejuang Aceh, mereka rakyat Aceh rela mengorbankan jiwa dan raga menjadi pejuang yang ingin mempertahankan Aceh sesuai aspirasi masyarakat Aceh sebagai daerah yang Islami. Maka Aceh terpaksa berada dibawah pemerintahan NKRI untuk membangun negara baru yang baru saja dimerdekakan dari penjajah.

3. Konflik Pasca Kemerdekaan

Kemerdekaan yang baru saja dirasakan oleh Aceh tidaklah bertahan lama karena adanya ketidaksamaan pendapat dalam membangun negara. Selain itu Aceh merasa dikhianati oleh Soekarno setelah apa yang telah dijanjikan atas perjuangan Aceh melawan penjajah.[41]

Konflik di tubuh militer khususnya ditubuh TNI angkatan darat tercermin dalam pertikaian-pertikaian yang melahirkan pembangkangan dan pemberontakan. Pembangkangan di Aceh dipimpin oleh gubernur Militer Aceh yaitu Kolonel Daud Bereueh. Dimana pada awalnya sumatera hanya dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan Aceh dipimpin oleh gubernur militer Daud Beureueh. Selain itu terdapat divisi IV Sumatera yang dipimpin oleh kolonel Semaun Gaharu. Namun dalam revolusi sosial tahun 1946 Kolonel Semaun Gaharu ditahan oleh Gerakan Perlawanan Rakyat terhadap bangsawan Aceh.

Tahun 1950 setelah penyerahan kedaulatan RI, sumatera dibagi 3 provinsi yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Sedangkan daerah militer Aceh

---

[41] Amran Zamzami SE, *Jihad Akbar di Medan Area*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990). hal: 314

dimasukkan kedalam provinsi sumatera Utara sebagai keresidenan. Pada saat itu Daud Beureueh meminta kepada pusat agai Aceh dijadikan provinsi sendiri namun hal ini tidak pernah dikabulkan oleh pusat, sehingga timbul kemarahan Daud Beureueh yang kemudian berinisiatif membangun negara islam dan memaklumkan daerah Aceh bagian dari pada Darul Islam yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1953, yang kemudian pemberontakan ini berhasil dipadamkan setelah Aceh mendapat daerah istimewa pada tahun 1962.[42]

C. Pengaruh sosiologis Dari perpolitikan Masa Kerajaan

Dalam catatan sejarah, Aceh mampu memberi warna dalam lembaran-lembaran kertas tentang keunggulan dan kejayaan masa kerajaannya yang begitu berkesan. Sebagaimana yang kita ketahui, pada zamannya Aceh telah memberikan banyak peradaban bagi perkembangan dunia Indonesia pada umumnya dan pada Aceh khususnya. Berdasarkan sejarah perkembangan Aceh itu sendiri, wilayah yang pernah menolak ultimatum Belanda[43] untuk menyerah dan mampu mengusir penjajah dibumi suci ini sangat kental dengan syariat Islam sejak awal datangnya Islam di Aceh hingga kerajaan Sultan Iskandar Muda dan sampai kepada pemerintahan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Kejayaan Aceh yang berkembang berdasarkan hukum Allah tidak luput dari sejarah-sejarah Aceh yang didalamnya dipelopori oleh pahlawan revolusi Aceh itu sendiri. Mulai dari ulama, uleebalang hingga mereka para inoeng balee yang begitu semangat mempertahankan Aceh dari jajahan Belanda-Jepang hingga penjajahan dari negeri Indonesia sendiri. Pasca merdeka dari Belanda dan Indonesia mempunyai kedaulatan negara sendiri, Aceh menjadi wilayah konflik dibawah pimpinan presiden Soekarno.

---

[42] Kivlan Zen, *Konflik dan Integrasi TNI-AD*, (Jakarta : Institusi for Policy Studies, 2004). hal 48-49

[43] Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Aceh Serambi*..., hal 311

Kejayaan kerajaan Aceh ditangan para pemimpin raja menjadikan Aceh sebagai lahan politik baru yang terus ingin dikuasai oleh para penjajah. Kendati pun demikian, Aceh tetap bertahan dalam mempertahankan wilayahnya, hal ini dapat dilihat bahwa warisan dari para indatu Aceh masih lekat dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh hingga sekarang.

Melekatnya istilah "*Adat bak Po Teumeuruhom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana"* menjadi pondasi utama yang dipegang oleh masyarakat Aceh dalam mempertahankan budaya sosialnya. Dalam kehidupan sosialnya, Aceh memiliki beberapa adat yang masih berkembang hingga sekarang. Yaitu:

1. *Adat Tullah :* adat ini merupakan aturan dan ketentuan yang berdasarkan Kitabullah (Al Quran). Dimana masyarakat Aceh meyakini bahwa adat Tullah tidak boleh dirubah-ubah, dan haruslah disyiarkan dalam masyarakat.
2. *Adat mahkamah* : aturan dan ketentuan yang dibuat Mahkamah Rakyat atau yang diputuskan oleh pemerintah resmi
3. *Adat tunah :* adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan harus sesui dengan Adat Tullah dan adat mahkamah. Apabila adat tunah tidak sesuai dengan adat Tullah dan adat mahkamah, maka adat tersebut tidaklah sah.[44]

Adat-adat tersebut telah jelas sumbernya dan tidak perlu diulas lagi, sehingga dalam membangun tatanan pemerintahan yang baik, para pendahulu Aceh berpegang pada adat-adat dan hukum yang bersumberkan pada Alquran dan Hadis. Selain itu, Aceh juga memiliki alam Zulfiqar[45] (bendera cap pedang) yang pernah dimunculkan pada masa kerajaan Aceh

---

[44] Muhammad Umar, *Darah dan Jiwa Aceh...,* hal: 14-15

[45] Alam zulfiqar (bendera) berasal dari kerajaan Aceh Darussalam, pada mulanya mempunyai warna dasar merah, sedangkan bintang, bulan sabit dan pedang berwarna putih. Pada masa pemerintahan Sultanah Ratu Nurul Alam Nakiatuddin dirubah menjadi warna dasar putih, sementara bintang, bulan sabit dan pedang bewarna merah.

Darussalam,[46] sedangkan pada masa perjuangan, Aceh memiliki bendera baru yag berwarna merah dan disimbolkan dengan bulan bintang. Bendera inilah yang menjadi salah satu semangat rakyat Aceh untuk memperjuangkan kekuatan politik Aceh dari konflik RI-GAM.

Selain itu, sejak masa kerajaan Islam samudera Pasa hingga sekarang, Islam telah diambil dan dipertahankan sebagai dasar negara yang bersumberkan daru hukum Quran dan Hadis. Aceh memiliki *Adat Meukuta Alam* (Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam) yang disebutkan sebagai Kanun Maukuta Alam al Asyi yang berisikan Al-Quran, Al Hadis, Ijmak Ulama Ahlus sunah, dan Qiyas. Sebgaimana berkembangnya qanun tersebut pada masa kerajaan, maka pada sistem pemerntahan Aceh juga masih dibaluti hukum-hukum yang berasaskan Islam. Hal ini karena masyarakat Aceh mempercayai bahwa Al quran menegaskan dan menjelaskan akan penciptaan dari sesuatu an berhak atasnya untuk menyampaikan sesuatu (berdakwa) yang benar.

Selain itu, seiring berjalannya zaman, Aceh masih mampu mempertahankan kualitas perempuan dalam memimpin sebuah jabatan. Hal ini juga tak lepas dari kehidupan sultanah yang berhasil membawa Aceh pada puncak kegemilangan. Keberhasilan sang ratu juga tidaklah terlepas dari para penasehat kerajaan yang bijak dan *alim* ilmu agama dan ilmu pemerintahan, sehingga apa yang telah diputuskan makan selalu dalam kebaikan.

---

[46] Ali Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977). hal: 20

BAB III

PARTAI POLITIK : PARTAI NASIONAL DAN PARTAI LOKAL

A. Partai Politik Perspektif Yuridis

Partai politik adalah suatu organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.[47] Berdasarkan sejarah, fenomena partai politik adalah perkembangan terkini dari pergulatan politik. Sejarah munculnya partai politik ditemukan pada abad ke – 19. Namun bentuk partai politik yang dikenal saat ini muncul dari semangat modernitas dalam dunia politik. Kemunculan partai politik berkaitan dengan kenyataan bahwa kepentingan politik kolektif membutuhkan suatu sistem organisasi-birokratis yang menjamin efisiensi dan efektifitas dalam perjuangan politik.[48]

Kemerdekaan suatu bangsa merupakan kontruksi dan partisipan sosial dalam memperjuangkan kemerdekaan yang membutuhkan peranan aktif setiap elemen masyarakat. Sehingga setelah kemerdekaan setiap elemen masyarakat akan mengklaim jasanya dalam memerdekakan suatu bangsa. Sehingga tidaklah mengherankan apabila muncul partai-partai politik yang sesuai dengan karakteristik setiap elemen masyarakat. Tujuan utama dalam pendirian partai politik adalah untuk menfasilitasi dan memungkinkan elemen tersebut berkuasa, meskipun dalam realitasnya tidaklah berjalan mulus. Untuk kasus di Indonesia, setelah kemerdekaan kita masih disibukkan dengan berbagai ancaman disintegrasi yang dipicu oleh ketidak puasan pihak-pihak yang merasa berjasa dalam memerdekakan bangsa ini.[49]

---

[47] Prof. Firmanzah, Ph. D, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011). hal: 67

[48] Prof. Firmanzah, Ph. D, *Mengelola...*, hal: 57

[49] Prof. Firmanzah, Ph. D, *Mengelola...*, hal: 60

Aktivitas politik perlu dibingkai dalam suatu lembaga formal yang memungkinkan aspirasi politik suatu kelompok yang diperjuangkan dalam suatu sistem formal. Secara garis besar, partai politik memiliki fungsi dan peran yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (a) mempunyai peran dan tugas internal organisasi dimana partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pembangunan partai politik. (b) partai politik juga mengemban tugaas yang bersifat eksternal organisasi dimana peran dan funfsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara.[50] Partai Politik berfungsi untuk: (a) melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (b) menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan/ perwakilan rakyat, (c) mempersiapkan anggota masyarakat untuk mngisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.[51]

Dalam pasal 1 angka 1 UU No.2/2008 *joncto* UU No.2/2011 tentang partai politik disebutkan bahwa[52] partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Di negara demokrasi seperti Indonesia, partai politik memiliki fungsinya tersendiri. Adapun fungsi tersebut adalah: (a) sebagai sarana komunikasi politik, (b) sarana sosialisasi

---

[50] Prof. Firmanzah, Ph. D, *Mengelola...,* hal 70-71

[51] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik bab IV yang membahas tentang fungsi, hak, dan kewajiban pasal 7 (ayat: 1-2)

[52] Basri M Nur, *Parnas vs Parlok: Pertarungan Partai Politik dalam Menguasai Aceh, (*Banda Aceh: GAMNA Publishing, 2014). hal: 75

politik, (c) sarana rekrutmen politik, dan (d) sarana pengatur konflik.[53] Negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sangatlah berkaitan dengan fungsi partai politik telah diatur dalam pasal 11 UU Partai Politik.[54] Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat, eksistensi partai politik adalah sebagai pendidik, dimana pendidik menginformasikan dan membujuk masyarakat untuk berperilaku tertentu.

Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang diberikan wewenang untuk membentuk partai politik lokal, pasca MoU Helsinki dan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan PP No.20/2007 tentang partai politik lokal di Aceh telah mengubah pemahaman rakyat Aceh terhadap politik, pemilu dan pemerintahan. Apabila dilihat lebih lanjut secara historis dan secara yuridis, partai politik lokal telah memiliki tempat dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia, khususnya pasal 28E ayat (3), dapat dipahami sebagai suatu bentuk jaminan konstitusional terhadap setiap warga negara untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Dengan berlandasakan pasal ini maka negara menjamin hak warga negara untuk mendirikan organisasi atau bentuk-bentuk perserikatan atau perkumpulan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Di sisi lain, pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tersebut memberikan peluang bagi

---

[53] Basri M Nur, *Parnas vs Parlok...*, hal: 75-76

[54] Dalam Pasal 11 UU Partai Politik disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana: (a) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (b) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, (c) penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, (d) partisipasi politik politik warga negara Indonesia, (e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Lihat pada Basri M Nur, *Parnas vs Parlok...*, hal: 76-77

kehadiran partai politik lokal di Indonesia sebagai perwujudan pelaksanan hak warga negara untuk berserikat atau berkumpul.[55]

B. Perkembangan Partai Politik Di Aceh

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara GAM dan pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, yang menandakan berakhirnya konflik separatis selama tigapuluh tahun di Aceh, memunculkan harapan baru dimana demokrasi menjadi salah satu instrumen yang sangat berharga untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian. Kesepakatan formal tersebut menjadi sebuah deklarasi resmi yang menandakan segala perang dan pertikaian dihentikan, sebaliknya, masalah yang selama ini timbul akan diselesaikan dengan cara dialog, damai dan anti kekerasan.[56] Penyelesaian konflik di Aceh memiliki implikasi dalam studi resolusi konflik baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, apabila penyelesaian masalah Aceh secara damai dapat berjalan dengan sukses, hal tersebut dapat merefleksikan bagaimana perdamaian dan demokrasi merupakan suatu kesatuan dan demokrasi dapat menghasilkan momentum untuk melaksanakan dialog dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik. Secara praktis, apabila proses perdamaian di Aceh terus berkelanjutan, adanya dorongan yang benar untuk berpartisipasi dalam negosiasi yang memberikan indikasi yang sangat penting untuk memulai sebuah penyelesaian perdamaian.[57]

Sebagian dari pada masyarakat Aceh mulai merasa puas dengan situai paska penandatanganan MoU Helsinky yang berhasil mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh. Perdamaian telah menciptakan babak baru dalam sejarah Aceh. Setelah damai, kesempatan untuk rakyat masyarakat Aceh untuk wilayahnya sendiri berjalan beriringan dengan terciptanya ruang

---

[55] Basri M Nur, *Parnas vs Parlok...*, hal: 78-79
[56] Aguswandi, *Rekonfigurasi Politik...*, hal: 23
[57] Bob Sugeng Hadiwinata dkk, *Transformasi...*, hal: 107-108

bagi demokrasi di tataran lokal.[58] Pemerintah pusat telah memberikan otonomi khusus untuk provinsi Aceh untuk memiliki keleluasaan yang besar untuk mengurusi sistem pemerintahannya sendiri.

Pada tangal 11 tahun 2006 Rancangan Undang-Undang pemerintahan Aceh yang telah di sepakati dari sidang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat secara aklamasi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ada tujuh pembahasan penting yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai perintah dari MoU Hesinki. Ketujuh hal tersebut adalah tentang pemerintahan Aceh, legislatif Aceh, partai politik lokal, lembaga pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh, lembaga wali Nagroe, pemilihan kepala pemerintahan Aceh dan penyelenggaraan pemilihan umum, dan ekonomi dan keuangan.[59] Maka dengan terbentuknya Undang-Undang tersebut, Aceh lebih leluasa dalam mengelola wilayahnya sendiri terutama dalam permasalahn politik dan membentuk partai lokal.

Dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa warga negara Indonesia yang berhak membentuk patrai politik lokal di Aceh adalah penduduk di Aceh, yaitu sekurang-kurangnya 50 warga negara Indonesia yang berusia 20 tahun atau sudah kawin, dan telah berdomisili tetap di Aceh, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pembentukan partai politik lokal dituangkan dalam sebuah akta notaris yang memuat angaran dasar, angaran rumah tangga, dan struktur kepengurusan. Untuk disahkan sebagai badan hukum partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% di kabupaten/kota dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap

---

[58] Teuku Zulkhairi, *Suara Rakyat Aceh*, (Banda Aceh: Gamma). hal: 175

[59] Aguswandi, *Rekonfigurasi Politik...*, hal: 47-48

kabupaten/kota yang bersangkutan. Syarat lain bagi partai politik lokal adalah mempunyai kantor tetap, dengan kepengurusannya yang berkedudukan di ibu kota Aceh.[60]

Terbentuknya partai politik lokal di Aceh memberi peluang besar untuk Aceh dalam membawa suara ke senayan. Namun persaingan politik sering terjadi antara parlok dan parnas yang akan mewarnai konstelasi politik di Aceh. Hal ini disebab, tidak semua masalah Aceh diselesaikan di provinsi Aceh sendiri, melainkan masuk ke dalam sistem politik nasional. Bagaimanapun, Nota Kesepakatan (MoU) ataupun UU No. 11/2006 adalah bagian dari kebijakan politik nasional, sekalipun dorongan dan masukan dari unsur-unsur masyarakat Aceh juga bisa diabaikan dan signifikan. Masa depan Aceh akan tercermin dari sukses atau tidaknya serta hasil pemilu legislatif Aceh itu sendiri.[61]

1. Partai Nasional

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 hingga pemilihan umum tahun 2014 masih diterapkan sistem kepartaian multi partai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kontestan partai yang turut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara teratur sejak tahun 1955. Dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan jumlah partai peserta pemilihan umum selalu lebih dari dua partai sehingga tidak dapat diidentifikasikan sebagai sistem partai tunggal atau sistem dua partai, karena diikuti oleh banyak partai politik. Kenyataan lain dapat dilihat dari komposisi anggota lembaga perwakilan rakyat yang berasal dari komponen banyak partai politik, setidaknya selalu lebih dari dua partai politik sejak terbentuknya DPR hasil pemilu tahun 1955.

---

[60] Hasan Basri M Nur, *Parnas vs Parlok...*, hal: 2-3
[61] Aguswandi, *Rekonfigurasi Politik...*, hal: 50-51

Indonesia mencatat bahwa perkembangan partai politik di Indonesia berkembang sangat cepat. Hal ini dilihat dari kesiapan partai politik yang terdaftar di KPU diseluruh Indonesia untuk mengikuti Pemilu. Berikut daftar partai politik di Indonesia yang pernah mengikuti Pemilu tahun 1955-2009.[62]

Tabel 1 Daftar nama Partai Politik di Indonesia (1955-2009)

Tahun	Nama Partai
1955	Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdatul Ulama (NU), PKI
1971	Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai NU, Partai Muslimin Indonesia, Partai Golkar, Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Nasional Indonesia, Partai Islam PERTI, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia.
1977-1997	Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia
1999	Partai Indonesia baru, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia-Supeni, Partai Aliansi Demokrat Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai Ummat islam, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Masyumi Baru, PPP, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Abul Yatama, Partai Kebangsaan Merdeka, Partai Demokrat Kasih Bangsa, PAN, Partai Rakyat Demokratik, Partai Syarikat Islam Indonesia 1905, Partai Katolik

[62] Amir Hendarsyah, *Buku Pintar Politik : Sejarah, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan*, (Jogja: Redaksi Great Publlisher, 2009). hal: 219-225

	Demokrat, Partai Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik Islam Indonesia, PBB, partai solidaritas pekerja, dll
2004	Partai Nasional Indonesia, Partai Buruh Sosial Demokrat, PBB, Partai Merdeka, PPP, Partai Persatuan Demokrasi kebangsaan, PAN, Partai Karya Peduli Bangsa, PKB, PKS, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai damai Sejahtera, Partai Perhimpunan Indonesia baru, Golkar, dll
2009	Hanura, PKPB, PPPI, PPRN, Gerindra, Barnas, PKPI, PKS, PAN, PIB, Partai Kedaulatan, PPD, PDK, Republikan, Partai Pelopor, Golkar, PPP, PDS, PNBK Indonesia, PBB, PDIP, PBRI, Partai Patriot, Partai Demokrat, PKB, Dll
2014	Partai Nasional Demokrat (Nasdem), PKB, PKS, PDIp, Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Hanura, PBB, dan PKPI

Dari hasil tabel tersebut menunjukkan bahwa proses pemilu yang berlangsung sejak tahun 1955 hingga 2014 adalah proses pemilu yang berlangsung secara demokrasi. Puncak demokrasi dapat dilihat pada pelaksanaan pemilu tahun 1999 yang telah memberikan kesempatan bagi partai politik untuk ikut serta dalam pemilu. Berbagai partai baru hadir dan menunjukkan kualitasnya pada rakyat Indonesia untuk terpilih sebagai perwakilan suara ke senayan.

Dalam pemilu 2014 terjadi dua agenda besar politik yang sangat penting dan menjadi sejarah perjalanan bangsa. Dua agenda tersebut adalah Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia lima tahun kedepan.

Ada 12 partai nasional dan 3 partai lokal yang telah tercatat sebagai bagian mengikuti pesata demokrasi rakyat atau pemilu.[63]

Tabel 2. Daftar hasil pemilu legislatif di 34 provinsi tahun 2014.[64]

No	Nama Partai	Suara	Persentase
1.	PDIP	23.681.471	18,95 %
2.	Golkar	18.432.312	14,75 %
3.	Gerindra	14.760.371	11. 81 %
4.	Partai Demokrat	12.728. 913	10, 9 %
5.	PKB	11.298.950	9,04 %
6.	PAN	9.481.621	7,59 %
7.	PKS	8.480.204	6,79 %
8.	Nasdem	8.402.812	6,72 %
9.	PPP	8.157.812	6,53 %
10	Hanura	6.579.498	5,26 %
11.	PBB	1.825.750	1,46 %

[63] Basri M Nur, *Parnas vs Parlok...*, (Banda Aceh: GAMNA Publishing, 2014). hal: 191

[64] *http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140509_rekapitulasi_kpu.shtml*. diakses pada tanggal 29 Juni 2014 pukul 12.29

12.	PKPI	1.143.094	0,91 %

2. Partai Lokal

Ketika partai lokal menjadi salah satu butir dari kesepakatan damai Aceh antara GAM[65] dan RI dapat dipahami bahwa pemberontakan rakyat Aceh yang direpresentasikan oleh GAM atas pemerintah pusat RI beberapa puluh tahun silam merupakan salah satu akar masalah ketidak adanya kedaulatan politik rakyat Aceh untuk mengurus dan mengatur diri sendiri secara optimal. Aspirasi politik rakyat Aceh selama ini dirasa telah terkebiri dan terbelenggu sedemikian rupa dalam kurungan NKRI yang didasarkan kehendak politik nasional. Sementara partai-partai nasional yang ada di Aceh hanyalah perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melanggeng hegemoni atas provinsi Aceh.[66]

Salah satu butir kesepakatan dalam kesepakatan damai Helsinki adalah partai lokal. Butir 1.2.1. (Partisipasi Politik) MoU Helsinki tertulis:

> .....*Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penendatangan Nota Kesepahaman ini, pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan Nasional. Memahami aspirasi masyarakat Aceh untuk partaipartai politik lokal, Pemerintahan RI dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatangan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh*

[65] Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah sebuah gerakan yang di deklerasikan oleh Hasan Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 di pedalaman Tiro. Munculkan gerakan ini dikarenakan Hasan Tiro berpendapat bahwa Aceh adalah sebuah wilayah yang dibelenggu Jawa/Jakarta sejak dari zaman Soekarno, Soeharto dan bahkan Habibi. Lihat pada Alwahadi Ilyas, *Aceh*..., hal: 348

[66] Hasan Basri M Nur, *Parnas vs Parlok*..., hal: 2

dengan berkonsultasi dengan DPR. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.[67]

Selain butir MoU Helsinki yang membahas tentang pembentukan partai politik, dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 juga dijelaskan tentang Pemerintahan Aceh yang memperbolehkan Aceh membentuk partai lokal sebagai wilayah otonomi daerah untuk berpolitik praktis. Tercatat bahwa pada pemilu 2009 ada enam partai lokal yang terdaftar di KPU untuk mengikuti pesta demokrasi. namun enam partai tersebut tidak bertahan lama karena tidak memperoleh suara yang cukup dan kurang diminati oleh masyarakat Aceh. Walau pun demikian, ada tiga partai yang hingga kini masih eksis didunia politik dan membawa perwakilan anak daerah Aceh ke senayan.

Tabel 3 Daftar nama Partai Politik Lokal di Aceh (2009-2014)

Tahun	Nama Partai
2009	Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA), Partai Bersatu Aceh (PBA)
2014	Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Daulat Aceh (PDA)

Menjamurnya partai lokal setelah dideklarasikan Aceh sebagai wilayah otonomi khusus di Indonesia tidak terlepas dari puncak demokrasi. Hal ini dapat disamakan dengan sejarah silam

[67] Selengkapnya lihat Nota Kesepahaman Damai Helsinki.

di Indonesia pada saat munculnya era reformasi di Indonesia. Berhasilnya rakyat Indonesia menggulingkan orde baru dibawah kekuasaan kepemimpinan Soeharto membuka celah baru bagi rakyat untuk membenah Indonesia bangkit. Maka hal serupa yang terjadi pada Aceh setelah provinsi Aceh mendapatkan kekhususan dari pemerintah Indonesia. Memajukan dan memakmurkan Aceh adalah impian sejak lama bangsa Aceh yang harus diwujudkan. Maka dari itu, para tokoh-tokoh Aceh yang mempunyai jasa dan peranan penting dalam wilayah Aceh membentuk partai politik karena hanya lewat partailah suara Aceh sampai ke senayan.

Perkembangan politik Aceh memunculkan partai-partai politik lokal yang kemudian mengambil bagian dalam pemilihan umum tahun 2009 dan 2014. Namun yang disayangkan adalah, ada partai-partai politik lokal yang pernah mengikuti pemilu tahun 2009 silam tidak dapat mengikuti pemilu pada tahun 2014 karena disebabkan kurangnya syarat untuk mengikuti pemilu.[68]

Lahirnya partai politik lokal di Aceh yang berdasarkan UUPA memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, partai politik lokal bertujuan untuk:

a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945
b) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI; dan
c) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.

---

[68] Dari enam partai lokal yang sempat ikut pemilu Legislatif 2009, hanya PA yang lolos *Electoral Treshold* dan bahkan meraup kursi hampir 50% di DPRA. PA juga memperolah kursi dominan diberbagai DPRK se-Aceh. Sementar lima partai lokal lainnya (PDA, PRA, PAAS, SIRA, dan PBA) hanya mencapai 2%. Kemudian yang hanya bisa bertahan hanya PDA (Partai Daulat Aceh yang kemudian menggantikan nama menjadi Partai Damai Aceh) dan PNA (partai Nasional Aceh yang merupakan partai baru yang didirikan oleh para mantan GAM yang selama ini tdak se-alur lagi dengan PA). Lihat pada Hasan Basri M Nur, *Parnas vs Parlok...*, hal: 3

Sedangkan secara khusus partai politik lokal bertujuan untuk:

a) Meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
b) Memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.[69]

Partai politik lokal di Aceh telah memberikan banyak makna bagi perpolitikan nasional apabila dilihat dari tahap awal yang menjadi bagian daripada jalan keluar atas pemberontakan dan separatisme. Namun partai politik lokal juga juga bisa menjadi sebuah bencana[70] jika tidak ada kontrol hukum yang ketat dan tegas terhadap pelanggaran pemilu; sebelum dan sesudah pemilu.

Partai politik lokal di Aceh dapat digolongkan ke dalam partai politik lokal dengan sistem tertutup karena tidak diberi kewenangan untuk turut serta dalam pemilihan umum nasional. Pasal 1 huruf i dan pasal 80 ayat 1 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh membatasi keikutsrtaan partai politik lokal di Aceh hanya pada pemilihan umumm tingkat lokal, yaitu pemilihan angota lesialatif daerah dan kepala daerah. Hal ini terkait dengan hak pembentukan partai politik lokal di Aceh dalam kerangka Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus.[71]

---

[69] Hasan Basri M Nur, *Parnas vs Parlok...*, hal: 222

[70] Persaingan politik aceh menjadi mengerucut pada dua partai lokal (PA dan PNA) yang merupakan partai yang dimotori oleh para eks GAM. Persaingan politik keduanya seakan tak kunjung selesai bahkan semakin memanas. Berbagai aksi saling balas, baik dalam bentuk teror maupun intimidasi hingga persoalan hukum seperti penganiayaan fisik hingga pembunuhan berencana. Lihat pada Hasan Basri M Nur, *Parnas vs Parlok...*, hal: 57-59

[71] Lihat selengkapnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

BAB IV

KETERTARIKAN MAHASISWA DALAM PARTAI

A. Profil Singkat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry

Universitas Islam Negeri adalah suatu lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam yang telah lama berkembang dimasyarakat sebagai jantung hati masyarakat Aceh. Universitas Islam ini sebelum menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) dikenal dengan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar Raniry yang dinisbahkan pada nama seorang ulama besar dan mufti kerajaan sultan Iskandar Tsani yang sangat berpengaruh saat itu. Syeikh Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Ranir di Gujarat, India telah memberikan kontribusi yang amat sangat berharga dalam perkembangan pemikiran Islam di Asia Tenggara khususnya di Aceh.[72]

Lahirnya Universitas Islam ini pada tahun 1960 dengan mendirikan fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah pada tahun 1962 sebagai salah satu fakultas cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian pada tahun yang sama dibangun juga fakultas Ushuluddin sebagai fakultas swasta di Banda Aceh. Setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, fakultas Syariah, Tarbiah dan Ushuluddin berinduk ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama enam bulan.

Pada tanggal 5 Oktober 1963 IAIN Ar Raniry resmi berdiri dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1963 dan diresmikan oleh Menteri Agama K.H Saifuddin Zuhri.

IAIN Ar Raniry menjadi IAIN ketiga di nusantara setelah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Awal diresmikan baru memiliki tiga fakultas,

---

[72] Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA, *Panduan Program S-1 dan D-3 IAIN Ar Raniry* (Banda Aceh: 2010). hal: 1

yaitu fakultas Syariah, Tarbiyah dan Ushuluddin. Pada tahun 1968 tepatnya 5 tahun IAIN ar Raniry, diresmikan pula fakultas Dakwah sekaligus menjadi fakultas pertama dilingkungan IAIN di Indonesia. Tahun 1968 IAIN Ar Raniry ditunjuk sebagai induk dari dua fakultas agama berstatus negeri di Medan (cikal bakal IAIN Sumatera Utara) yaitu Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah yang berlangsung selama 5 tahun. Sementara pada tahun 1983 Fakultas Adab resmi menjadi salah satu dari 5 fakultas di lingkungan IAIN Ar-Raniry.

Pada tahun pertama kelahirannya, IAIN masih mengharapkan bantuan dari berbagai lapisan masyarakat Aceh, terutama dari sisi kebutuhan belajar mengajar. Diibaratkan anak baru lahir, semuanya harus diurus oleh orang tuanya. Dalam konteks masa itu, seluruh lapisan masyarakat Aceh harus mampu memberi bantuan dalam bentuk apapun untuk keperluan pendidikan di IAIN. Seperti yang tertulis dalam laporan yang ditandatangani oleh kuasa Rektor I Drs. H. Ismail Muhammad Sjah.

Presiden Sukarno dalam sambutan dies natalis pertama IAIN Ar-Raniry menyampaikan bahwa di Aceh harus melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang mampu meneruskan rovolusi dan perjuangan bangsa serta setia kepada Pancasila sebagai haluan negara. IAIN harus menjadi tempat penggodok kader revolusi yang menjaga jiwa toleransi dan persatuan bangsa. Semua itu harus tertanam dalam jiwa pendidik, pengajar dan mahasiswanya.

Mengikuti perkembangannya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, IAIN telah menunjukkan peran dan signifikansinya yang strategis bagi pembangunan dan perkembangan masyarakat. Lulusannya mampu mengemban amanah diberbagai instansi pemerintah dan swasta, termasuk di luar Aceh, bahkan di luar negeri. Alumni telah berkiprah di berbagai profesi, baik yang berkaitan dengan sosial keagamaan, maupun yang berhubungan dengan aspek publik

lainnya. Lembaga ini telah melahirkan banyak pemimpin di daerah ini, baik pemimpin formal maupun informal.

Tepat pada 5 Oktober 2013 genap berumur 50 tahun, biasanya tahun ini disebut tahun emas. Bertepatan dengan tahun tersebut Perguruan Tinggi ini akan merubah wajah dan namanya dari Institut menjadi Universitas melalui PERPRES No. 64 Tahun 2013 yang dikeluarkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry).[73]

B. Ketertarikan Mahasiswa UIN Ar Raniry Terhadap Politik Praktis

Berpolitik menjadi suatu keharusan bagi mahasiswa selama berada di lembaga pendidikan. Sebagai mahasiswa yang terdidik dan berpotensi untuk memahami karakteristik suatu pemerintahan. Berpolitik mahasiswa adalah berpolitik kampus dalam artian bahwa mahasiswa hanya menggali sistem pemerintahan kampus tingkat mahasiswa saja. Namun yang menjadi persoalan adalah berkembangnya sistem politik partai dalam lingkungan mahasiswa menjadikan mahasiswa tidak berjalan sesuai hukum perguruan tinggi.

Berkembangnya perpolitikan Aceh semenjak Aceh menjadi wilayah otonomi daerah menjadikan mahasiswa lebih tertarik untuk menjadi bagian dari pada pemerintahan Aceh dengan jalur partai. Penyebab ketertarikan mahasiswa disebabkan karena mahasiswa berkontak langsung dengan elit politik maupun kader dari pada suatu partai.

Dapat dilihat pada mahasiswa yang menjadi aktivis Partai Gerindra. Keaktifannya di partai Gerindra timbul karena mahasiswa mempunya salah satu anggota keluarga yang menjadi

[73] *http://uin.ar-raniry.ac.id/web/web/pages/19/sekilas-uin-ar-raniry*. diakses 01 Juli 2014 pukul 19.52

bagian pengurus atau pun menjadi *caleg* dari partai tersebut. Kemudian mahasiswa yang aktif di partai Gerindra akan melakukan edukasi politik partai terhadap mahasiswa-mahasiswa yang lain saat berkumpul bersama maupun adanya rapat dalam sebuah organisasi kampus.[74]

Selain itu, daya tarik mahasiswa terhadap partai PKS yang menjadi aliansi dari pada organisasi ekstra kampus LDK ditemukan saat adanya kajian rutin akhwat setiap minggu di hari jum'at atau pun adanya *liqoo*. Dengan adanya rutinitas seperti ini, maka mahasiswa akan cenderung tertarik menjadi bagian dari pada partai PKS.[75] Selain itu ditemukan juga bahwa tingkat ketertarikan mahasiswa terhadap partai Golkar disebabkan adanya kepentingan sesama pihak dalam merekrut mahasiswa. Seorang mahasiswa yang membangun sebuah erganisasi kemahasiswaan diluar kampus bertujuan untuk mendapatkan bantuan dari elitisi Politik guna menghidupkan organisasi yang dimaksud. Namun, seorang elitisi politik tidak memberikan bantuan dengan cuma-cuma kepada pendiri organisasi. Elit politik meminta agar mahasiswa yang bersangkutan mampu merekrut mahasiswa dari berbagai universitas di aceh termasuk UIN Ar Raniry untuk dapat mengikuti kader pelatihan pemimpin yang di agendakan oleh Golkar. Dengan demikian, pengenalan sistem partai Golkar pun terjadi pada mahasiswa melalui edukasi politik yang menjadikan mahasiswa semakin terikat dan tertarik terhadap partai.[76]

Dalam kasus seperti ini, mahasiswa lebih tertarik dengan partai nasional ketimbang partai lokal yang menjadi partai baru untuk wilayah Aceh. Kurangnya minat mahasiswa menjadi bagian dari pada kader anggota partai lokal disebabkan kurangnya pengalaman partai lokal

---

[74] Wawancara dengan Azmi (Ushuluddin: waket HMJ AF), Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 04 Juli 2014 pukul 16.45

[75] Wawancara dengan FM (Nama disamarkan), salah satu aktivis LDK yang juga aktif di PKS (Ushuluddin), Universitas Islam Negeri Banda Aceh, 17 Juni 2014 pukul 10.00.

[76] Wawancara dengan Syauqi futtaqi (Alumni Ushuluddin: *Caleg* Golkar), 12 juli 2014 pukul 14.36

dalam membangun nilai politik di Aceh sehingga sering terjadinya konflik sesama partai. Maka menjadi bagian partai nasional lebih baik dari pada partai lokal.[77]

C. Eksistensi Organisasi Mahasiswa Dalam Partai Politik

Organisasi mahasiswa adalah sebuah organisasi yang memiliki kedudukan resmi dan adanya pengelolaan yang didanai langsung oleh suatu lembaga. Organisasi mahasiswa dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu ; (a) organisasi mahasiswa intrakampus dan (b) organisasi mahasiswa ekstrakampus. Sebagai organisasi mahasiswa yang mendidik generasi bangsa untuk menjadi pemimpin, maka setiap organisasi mahasiswa memiliki sikap politik yang baik perindividu dalam berorganisasi.[78] Para aktivis organisasi mahasiswa haruslah memiliki cara pandang yang kritis dan memiliki rasa idealisme untuk membangun sudut pandang yang netral dan independen.

Mahasiswa merupakan bagian dari pada tulang punggung negara dikarenakan mahasiswa merupakan golongan muda yang memiliki intelektual segudang pemikiran dan pandangan yang berlian, tajam, analis dan kritis. Hanya dengan bermodal idealisme dan rasa kepekaan sosial yang tinggi dan mempunyai semangat dan jiwa yang berapi-api, maka mahasiswa mampu merontokan dan menumbangkan sebuah rezim pemerintahan.

Organisisasi mahasiswa menjadi harapan baru untuk merubah kondisi politik yang berkembang tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya dalam lingkungan masyarakat. Sebagaimana adanya, organisasi mahasiswa intrakampus dan ekstrakampus saling membutuhkan satu sama lain. Dan kebanyakan aktivis mahasiswa yang aktif dalam membangun politik kampus

---

[77] Wawancara dengan Muliady (Ushuluddin: Kader Pemula partai PAN, 2011), Universitas Isalam Negeri, Banda Aceh, 29 Juni 2014 pukul 00.47.

[78] *http://Organisasi-mahasiswa-di-Indonesia/Wikipedia-bahasa-Indonesia/ensiklopedia-bebas.htm.* diakses 10 Juli 2014 pukul 12.32

melalui organisasi intrakampus juga ikut berkiprah dalam organisasi ekstrakampus. Dengan adanya kaitan antara kedua organisasi ini, maka nilai-nilai politik praktis pun mulai memasuki dunia kampus.[79]

Aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang dikenal mahasiswa sebagai organisasi ekstra kampus adalah salah satu organisasi yang akan melahirkan cikal bakal aktivis kader partai PKS yang nantinya juga akan ikut berkiprah dalam organisai kampus seperti HMJ, BEMAF, dan DEMA. Tidak hanya itu, dapat ditemui juga aktivis KAMMI, HMI, PII, dan FORBESMA yang aktif dalam organisasi kampus.[80] Dengan adanya kaitan kedua organisasi ini, maka ideologi politik praktis memasuki kampus hingga menimbulkan hasrat baru bagi mahasiswa untuk berkecimpung dalam politik partai.

Kehadiran ideologi politik praktis dalam kehidupan kampus melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang tidak independen dan idealis. Namun tidak sedikit juga mahasiswa yang berkiprah dalam politik praktis mampu membangun politik kampus dalam organisasi intrakampus sesuai kode etik kampus itu sendiri. Memasuki dunia politik praktis sebagai kader penggalang partai hanya sebagai edukasi politik yang harus ditanam mahasiswa yang kemudian diaplikasikan dalam politik kampus untuk membangun sebuah organisasi yang di jabati mahasiswa.[81]

Tahun 2014 tercatat bahwa di Universitas Islam Negeri Ar Raniry khususnya dari fakultas Ushuluddin, seorang alumni yang pada awalnya berstatus sebagai mahasiswa dan aktif

---

[79] Wawancara dengan Zulfata (Ushuluddin: Aktivis HMI dan Kader Penggalang Golkar, 2011), Universitas Islam Negri, Banda Aceh, 29 Juni 2014 pukul 09.15.

[80] Wawancara dengan Husnul Hamdi (Ushuluddin: Mantan ketua HMJ AF), Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 08 Juli 2014 pukul 10.45.

[81] Wawancara dengan Azmi (Ushuluddin: waket HMJ AF), Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 04 Juli 2014 pukul 16.45

dalam organisasi ekstra-kampus juga sebagai kader penggalang partai Golkar berhasil mendapat *rekomendasi* dari eliti partai Golkar untuk menjadi calon legislatif di daerah Bireuen. Bukan hal yang mudah bagi mahasiswa yang tergolong masih muda dapat menjadi bagian dari pada suatu partai. Namun untuk mencapai target dan apa yang diimpikan oleh mahasiswa untuk merubah bangsa haruslah memiliki hasrat yang kuat untuk membangun potensi diri dalam meyakini elitisi partai bahwasanya seorang mahasiswa yang aktif akan mampu merubah bangsa ini.[82]

Aktivis mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus haruslah memiliki komunikasi yang luas dengan organisasi ekstra kampus yang nantinya mampu membangun pendidikan politik sesama aktivis yang kemudian akan didampingi oleh elitisi partai untuk *memobilitasi* mahasiswa yang peka terhadap pendidikan politik. Dengan demikian, sebuah wadah organisasi mampu melahirgan generasi-generasi bangsa yang berkomitmen merubah bangsa.

D. Pengaruh Elit Partai Terhadap Mahasiswa

Eksitensi partai politik dalam lingkaran pemerintahan monarki dan demokrasi sudah sangat lama dikenal. Kehadirannya merupakan reaksi terhadap hak-hak individu untuk menyalurkan inspirasi politik sebagai warga negara.[83] Aceh sebagai suatu wilayah yang terletak di ujung barat pulau sumatera dikenal sebagai daerah yang sangat populer dengan warung kupi, dan hampir seluruh masyarakat Aceh dari berbagai usia memanfaatkan warung kopi sebagai salah satu tempat diskusi politik. Sehingga mempermudahkan mahasiwa untuk berdiskusi langsung atau bertatap muka langsung dengan para elit partai maupun caleg, sehingga dengan seringnya berlangsung diskusi politik antara mahasiswa dan para elit partai, maka akan lebih mudah mengorganisir mahasiswa untuk mendukung dan menjadi bagian dari pada suatu partai.

---

[82] Wawancara dengan Syauqi futtaqi (Alumni Ushuluddin: *Caleg* Golkar), 12 juli 2014 pukul 14.36
[83] Basri M Nur, *Parnas vs Parlok...*, hal: 23-25

Misalnya dapat kita lihat pada sebuah diskusi yang bertemakan politik Aceh dan mahasiswa larut dalam pembahasan diskusi politik, dan pada saat larutnya mahasiswa dengan pembahasan yang dibicarakan, maka akan dimasukkan sedikit demi sedikit pendidikan politik untuk memahami kondisi politik yang benar dan memadai.

Sebagai suatu organisasi yang harus mendapatkan perhatian rakyat, maka partai politik tidak luput dari keharusan untuk menawarkan manfaat kepada target yang ingin dijadikan sebagai sasaran.[84] Hal ini dikarenakan hubungan antara partai politik dengan politisi haruslah berjalan secara efektif tanpa adanya politisi yang berdedikasi tinggi, sehingga partai politik mampu mengembangkan kemampuan organisasi agar selalu diterima dalam masyarakat dan tetap siap beradaptasi dengan perubahan lingkungan.[85]

Partai politik dan elit politik akan menjadi suatu hal yang asing dan tidak baik dihadapan mahasiswa apabila tidak terikatnya ikatan emosional dan rasional antara elit partai politik dan mahasiswa. Namun ketika ikatan rasional dan emosional ini dapat terikat baik dengan mahasiswa, maka akan menciptakan pola pikir yang negatif dari mahasiswa untuk partai dan elit politik sehingga akan mudah mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam partai dengan menjadi kader calon anggota partai.[86] Selain itu juga akan mengurangi tingkat jumlah golput dalam setiap pelaksanaan pemilu. Pada pemilu tahun 2009 tercatat 49.677.075 atau sekitar 29, 01% yang menjadi golput atau rakyat tidak memberikan suara dalam proses pemilihan umum.

---

[84] Peranan Teknologi Informasi Bagi Organisasi dan Insan Politik disampaikan pada pelatihan rekruitmen kader anggota penggalang Golkar di Banda Aceh, 10-11 maret 2012.

[85] Adaptasi dengan perubahan lingkungan dapat memproduksi isu politik dan program kerja partai yang sejalan dengan perkembangan yang terdapat dalam masyarakat. Selain itu dapat mengumpulkan dan mengolah informasi yang didapat dari lingkungan agar dapat memperbaharui program kerja sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam mencari sebuah partai politik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dari program kerja partai politik. Lihat pada Prof. Firmanzah, Ph. D, *Mengelola...*, hal: 397-398

[86] Prof. Firmanzah, Ph. D, *Mengelola...*, hal: 399

Sebagai elitisi politik haruslah memiliki karakteristik dan mampu berbicara dengan baik dan tersusun sehingga tercegah munculnya konflik horizontal maupun vertikal. Dengan menunjukkan cara berpolitik yang sehat, maka mahasiswa akan cenderung menghormati dan akan menjadikan elitisi politik sebagai idola yang harus dicontoh.

E. Pola *Recruitment* Partai Politik

Partai politik sebagai suatu organisasi yang sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional, dan pemimpin yang berkualitas tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Maka organisasi partai politik perlu mengembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politik.[87]

Rekruitment politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara agar sistem politik dapat berfungsi dengan baik guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Biasanya proses rekruitmen dapat dilakukan secara (a) terbuka, (b) tertutup dan (c) semi tertutup.[88] Pola rekrutmen yang terbuka sedikit banyak ditentukan oleh derajat pelaksanaan demokrasi yang dalam sebuah negara akan dapat memilih orang-orang yang memili kapasitas kepemimpinan yang kuat, mempunyai pengalaman dan kecakapan yang cukup baik, guna melaksanakan fungsi yang diharapkan darinya. Dengan demikian, negara dapat memilih

---

[87] Prof. Firmanzah, Ph. D, *Mengelola...*, hal: 71

[88] Amir Hendarsyah, *Buku Pintar Politik...*, hal: 155

orang-orang yang memiliki integritas pribadi yang baik, berakhlak mulia, dan dengan demikian ia akan menjadi amanah terhadap jabatn yang diberikan kepadanya.[89]

Selain merekrut, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi kader-kader politiknya. Sistem kaderisasi sangat penting karena adanya transfer pengetahuan (*knowledge)* politik yang tidak hanya terkait mengenai sejarah, visi, misi dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara. Tugas utama yang diemban oleh partai politik dalam hal ini adalah menghasilkan calon-calon pemimpin berkualitas yang nantinya akan 'diadu' dengan partai lain melalui mekanisme pemilu.[90]

Sistem kaderisasi perlu disertai dengan sistem transparan yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik. Kader dan calon pemimpin harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan. Karena dengan sistem ini akan terbebas dari persaingan kolusi dan nepotisme yang kemudian akan melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas.

Gambar 1. Bagan Metode *Rekrutment* dan Seleksi Pemimpin

[89] Amir Hendarsyah, *Buku Pintar Politik..*, hal: 155
[90] Prof. Firmanzah, Ph. D, *Mengelola...*, hal: 72

Gambar 2. Tahapan pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat.[91]

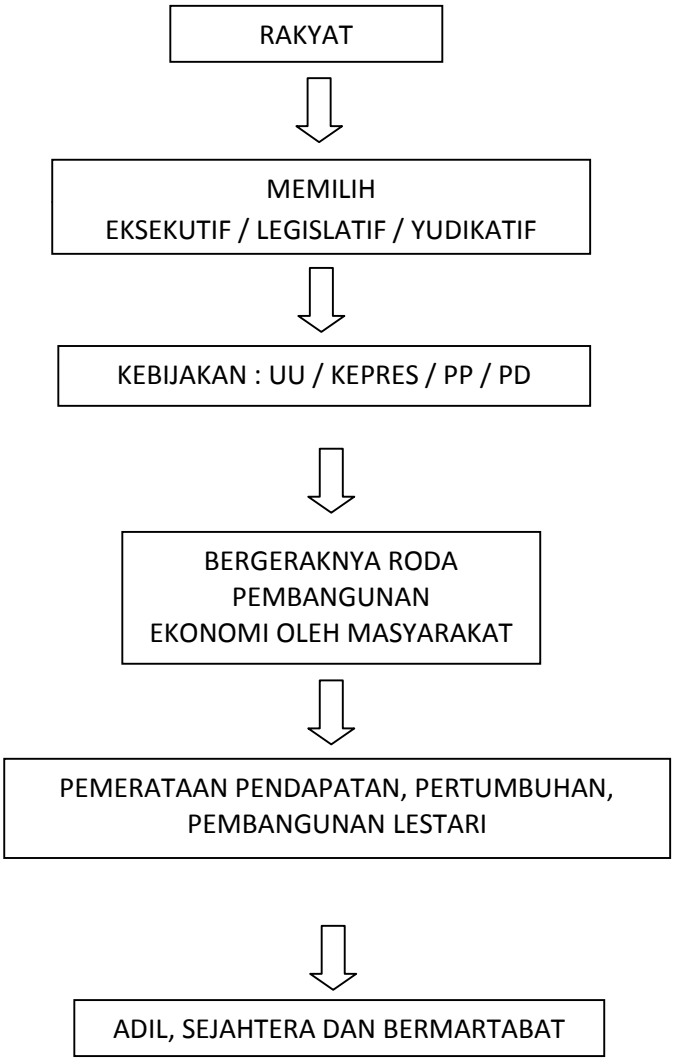

Secara garis besar penentuan sumber kader dapat dilakuakn dengan dua sumber, yaitu perekrutan dari dalam partai politik dan perekrutan dari luar partai politik. Keunggulan atas kebijakan penentuan sumber kader dari dalam partai politik antara lain:[92]

[91] Hasan Basri M Nur, *Parnas vs Parlok...*, hal: 248
[92] Prof. Firmanzah, Ph. D, *Mengelola...*, hal: 73

a. Kenaikan posisi yang lebih tinggi dari posisi sebelumnya akan mendorong kader untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja.
b. Pemindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain dalam suatu tingkatan dapat menghindarkan kejenuhan dan kebosanan terhadap jabatan lama yang sifatnya monoton.
c. Promosi dan mutasi akan menimbulkan akan menimbulkan semangat dan gairah kerja lebih tinggi lagi bagi kader,
d. Alokasi dana dalam promosi dan mutasi dapat lebih rendah dari pada pencarian kader dari luar partai politik.
e. Alokasi waktu relatif singkat sehingga kekosongan posisi dapat segera diduduki oleh oleh kader dalam partai politik.
f. Karakteristik pribadi, kecakapan dan kepiawaian kader dari dalam partai politik yang akan menempati suatu posisi telah diketahui dengan nyata.

Mengadakan kaderisasi partai politik juga harus mampu melakukan pendidikan politik, sosialisasi politik sehingga dapat menciptakan kapasitas yang berkualitas untuk kader yang akan direkrut. Pengalaman Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam melalukan perekrutan mahasiswa dilakukan secara pembentukan agenda kaderisasi melalui ormas-ormas islam yang bersinergi dengan perjuangan partai dan berasal dari organisasi kepemudaan mahasiswa seperti Pemuda Islam (PI), Pemuda Ka'bah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Komite Mahasiswa Islam (KMI), dll. Tujuannya adalah untuk mendidik dan membentuk pola pikir mahasiswa sebagai kader dasar dari calon anggota partai PPP yang mampu menyatukan aspirasi umat islam dan menindak lanjutiny sehingga kehidupan yang berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan sesuai dengan keinginan umat.[93] Tidak hanya itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga

[93] Wawancara dengan Bapak Hadya Noer (Pengurus DPW-PPP Aceh), Tanggal 26 Juni 2014 pukul 16.19.

melakukan sistem rekrutmen yang berorientasikan pada organisasi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang melewati proses pelatihan Siddiq dan Liqo dengan tujuan untuk membangkitkan jiwa Islam dari dalam diri mahasiswa atau pemuda Islam.[94]

Partai Golongan Karya (Golkar) juga melakukan perekrutan kaderisasi melalui jalur mahasiswa dengan pembentukan agenda pendidikan politik berbasis pelatihan kepemimpinan. Mahasiswa yang memiliki daya tarik terhadap partai golongan karya cenderung akan lebih aktif setelah perekrutan kaderisasi.[95] Tidak hanya itu, golkar juga mampu menarik kader calon anggota dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) karena faktor banyaknya aktivis HMI yang mendalami dan menjadi bagian dari pada partai Golkar.

F. Posisi Mahasiswa Dalam Partai Politik

Mahasiswa adalah bagian dari lapisan masyarakat yang terdidik yang memiliki kesempatan untuk menikmati dunia pendidikan di perguruan tinggi. Sesuai perkembangan usianya, maka secara emosional kematangan berfikir juga turut berkembang sesuai dengan masalah yang dihadapi dilingkungan pendidikan maupun di luar dunia pendidikan dalam proses pencarian jatidiri.

Sebagai rakyat yang independen, mahasiswa mampu melakukan gebrakan-gebrakan merakyat dalam mensejahterakan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan sagama di lingkungannya. Kondisi Aceh yang jauh lebih baik dari pada sebelumnya menghipnotis mahasiswa untuk tampil didalam partisipan politik partai sebagai kader penggalang anggota.[96]

---

[94] Wawancara dengan FM (Nama disamarkan), salah satu aktivis LDK yang juga aktif di PKS (Ushuluddin), Universitas Islam Negeri Banda Aceh, 17 Juni 2014 pukul 10.00.

[95] Wawancara dengan Syauqi futtaqi (Alumni Ushuluddin: *Caleg* Golkar), 12 juli 2014 pukul 14.36

[96] Wawancara dengan Zulfata (Ushuluddin: Aktivis HMI dan Kader Penggalang Golkar, 2011), Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 29 Juni 2014 pukul 09.15.

Keaktifannya dalam partai politik mampu menggait para pemimpin partai untuk merekrutnya sebagai calon anggota partai setelah mendapat gelar sarjana. Namun selama menjadi anggota kader penggalang, mahasiswa haruslah menekuni setiap kegiatan yang dilakukan partai dan menjalankan visi dan misi partai serta sejarah, ideologi dan asas sebuah partai.

Pada tahap permulaan perekrutan mahasiswa sebagai kader calon anggota partai, posisi mahasiswa adalah sebagai pemula yang menanamkan bekal persiapan untuk melewati lika-liku demokrasi.[97] Sehingga mahasiswa akan menjadi agen penyiar kebenaran tentang etika-etika politik sesuai dengan hukum dan agama yang menjamin kemaslahatan umat.[98] Sebagai kader calon anggota partai, mahasiswa haruslah mampu melihat kedepan tentang kejolak yang akan terjadi pada partai dan perubahan partai dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas kegiatan partai politik mampu merubah pola pokir yang benar dan netral.[99]

Keberadaan mahasiswa sebagai kader calon anggota partai juga sebagai kunci hidup menjalankan asas demokrasi yang baik di Indonesia khususnya Aceh. Dengan demikian akan memudahkan jalan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak baik yang berkembang dalam kehidupan politik sebagaimana yang dipandangii oleh kebanyakan masyarakat.[100]

Keharusan mahasiswa untuk terjun kedalam dunia politik praktis akan menjadi pribadi mahasiswa yang memiliki intelek, kapasitas diri dan memiliki kebijakan dalam memutuskan

---

[97] Wawancara dengan Muliady (Ushuluddin: Kader Pemula partai PAN, 2011), Universitas Isalam Negeri, Banda Aceh, 29 Juni 2014 pukul 00.47.

[98] Wawancara dengan Aulia Agustiar (Tarbiyah: Mahasiswa Aktif 2011), Universitas Islam Negeri Banda Aceh, 30 Juni 2014 pukul 4.32.

[99] Wawancara dengan Rosalita (Ushuluddin: Mahasiswa Aktif 2011), Universitas Islam Negeri Banda Aceh, 16 Juni 2014 pukul 09.45.

[100] Wawancara dengan Sarah Sapna Randa (Tarbiyah: Mahasiswa aktif), Universitas Isalam Negeri, Banda Aceh, 27 Juni 2014 pukul 09.35.

suatu masalah dalam prakteknya. Aktifnya mahasiswa dalam organisasi politik partai tidak hanya dikarenakan keinginan sendiri dalam berpolitik praktis, melainkan karena adanya kesempatan dan peluang untuk mendalami ilmu politik dan direkrut sebagai kader pemula partai.[101]

G. Keterlibatan Mahasiswa Dalam Partai Politik

Partai politik telah menjadi wadah pendidikan politik bagi rakyat dan khususnya mahasiswa. Melalui pendidikan politik, mahasiswa dapat memahami peran dan fungsi pemerintah serta mampu memahami cara pengurusan kepentingan orang banyak seperti menjadi pemimpin pemerintahan. Selama ini kebanyakan mahasiswa hanya mampu menyalahkan pemerintahan dan partai politik sebagai elit pemerintahan yang berlaku tidak adil dan tidak benar dalam memimpin negara.[102] Keterlibatan beberapa mahasiswa yang tertarik dengan politik partai cenderung melahirkan mahasiswa-mahasiwa fanatik dan tidak idealis dalam membangun bangsa.[103] Mahasiswa dikenal sebagi *agent of change* haruslah mampu mengontrol perjalanan politik Aceh terlebih setelah Aceh di deklarasikan sebagai satu-satunya wilayah yang memiliki otonomi khusus di Indonesia.

Untuk menjelaskan kompleksitas ketertarikan mahasiswa sebagai partisipasi politik partai di UIN Ar Raniry, tidak terlepas dari sistem edukasi politik yang ditanamkan dalam jiwa mahasiswa sehingga terciptanya pandangan kritis dalam menganalisa atau mengamati kondisi dan situasi politik Aceh paska MoU Helsinki. Edukasi politik akan mengarahkan mahasiswa untuk berpolitik dengan sehat, berkopetensi dengan baik, dan menghormati peraturan yang telah

---

[101] Wawancara dengan Hayatun Nufus (Dakwah: Aktivis KAMMI, 2011), Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 19 Juni 2014 pukul 10.10.

[102] Wawancara dengan Hasanuddin (Ushuluddin: Aktivis HMI dan Kader Penggalang Golkar, 2011), Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 25 Juni 2014 pukul 10.15.

[103] Wawancara dengan Risa Trisnawati (Ushuluddin: Aktivis HMI, 2011), Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 16 Juni 2014 pukul 11.37.

disepakati bersama untuk menjaga nilai-nilai politik yang sebenarnya. Oleh karena itu, sistem edukasi politik yang diterapkan pada mahasiswa biasanya dilaksanakan dalam proses pendidikan dan pelatihan kader partai.[104] Terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan kader partai akan menumbuhkan semangat memimpin dari dalam jiwa mahasiswa sehingga menjadikan mahasiswa yang idealis terhadap partai dan juga mahasiswa yang mempunyai independensi diri dalam lingkungan kampus.[105]

Bagi mahasiswa, politik adalah sebuah struktur yang secara fungsional memiliki pengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial dan mengontrol kebijakan suatu daerah maupun lingkungan sekitar.[106] Mahasiswa yang mendalami kerangka ideologi suatu partai dapat di umpamakan sebagai permukaan cermin. Realitas yang di tangkap adalah apa yang dipantulkan oleh sebuah cermin, sementara pantulan itu sendiri tergantung pada permukaan cermin. Jika cerminnya cembung, realitas yang kecil bisa menjadi besar. Jika cerminnya cekung, maka realitas yang besar bisa menjadi kecil. Demikian pula jika cerminnya retak. Maka realitas yang menyatu dan koheren akan tampak tercerai-berai. Karena itu, kerangka ideologis yang berbeda akan merefleksikan pemahaman yang berbeda pula.[107]

Dalam kasus politik Aceh, sebagian mahasiswa telah mampu mengamati dengan cermat perkembangan politik dalam bagian politik partai. Dapat dilihat pada cara kerja kampanye partai nasional dan partai lokal beberapa bulan sebelum pemilu april 2014. Dimana partai lokal belum memiliki kematangan berpolitik praktis dengan baik sesuai dengan nilai-nilai politik, sehingga

---

[104] Wawancara dengan Rizal Vahlaivi (caleg 2014 dari partai Gerindra), 25 Juni 2014 pukul 00.58.

[105] Prof. Firmanzah, Ph. D, *Mengelola...*, Hal: 78

[106] Wawancara dengan Hasanuddin (Ushuluddin: Aktivis HMI dan Kader Penggalang Golkar, 2011), Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 25 Juni 2014 pukul 10.15.

[107] Wawancara dengan Hayatun Nufus (Dakwah: Aktivis KAMMI, 2011), Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 19 Juni 2014 pukul 10.10.

memunculkan konflik sesama partai lokal yang keduanya saling tuduh menuduh, intimidasi hingga jatuh korban jiwa. Hal inilah yang menjadikan sebagian mahasiswa alergi untuk menjadi bagian dari pada calon kader anggota partai lokal.[108]

Independensi mahasiswa sebagai pelajar telah mampu memilah antara pendidikan politik dan fanatisme politik. Mahasiswa yang fanatik terhadap suatu partai menunjukkan ketidak matangan daya nalar berpikir secara kritis dan baik.[109]

H. Perubahan Karakter Mahasiswa Setelah Berpolitik Praktis

Karakter adalah kepribadian sikap yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila sikap itu baik dan berjalan diatas aturan, maka akan melahirkan kenyamanan dalam berkomunikasi. Namun karakteristik mahasiswa cenderung berubah ketika mahasiswa tidak lagi berjalan atas aturan perguruan tinggi. Pada tahun 2013 tercatat beberapa kasus kekerasan berpolitik dalam kampus antar mahasiswa menimbulkan kericuhan hingga kekosongan kekuasaan pemerintahan mahasiswa tingkat universitas dan adanya kecurangan dalam pemilihan pemimpin tingkat fakultas dan jurusan.

Perguruan tinggi telah mendidik mahasiswa untuk menerapkan sistem politik yang baik dan sesuai aturan. Namun, beberapa pihak yang merasa benar dan menjadi pelindung mahasiswa lainnya tidak menjalankan hukum pemerintahan kampus yang telah ditetapkan, sehingga konflik antara mahasiswa pun terjadi.

---

[108] Wawancara dengan Muliady (Ushuluddin: Kader Pemula partai PAN, 2011), Universitas Isalam Negri, Banda Aceh, 29 Juni 2014 pukul 00.47.

[109] Wawancara dengan Azmi (Ushuluddin: waket HMJ AF 2011), Universitas Isalam Negeri, Banda Aceh, 16 Juni 2014 pukul 10.15.

Keterbelakangan moral mahasiswa menyebabkan mahasiswa menjadi keras kepala dan berlaku curang dalam berpolitik kampus. Hal demikian dipengaruhi oleh lingkungan organisasi ekstra kampus yang kebanyakan dari mahasiswa telah menjadi aktivis partai maupun aktivis berideologi kiri. Mahasiswa yang demikian akan menerapkan sistem demokrasi partai dalam pemilihan suara presiden kampus atau menerapkan sistem pemerintah kampus maupun fakultas sesuai sistem politik yang didapatkan dari organisasi ekstra kampus.[110]

Tahun 2013 tercatat sebuah kasus politik yang tidak sesuai dengan aturan yang dijalankan oleh mahasiswa saat pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa fakultas. Seorang mahasiswa mengajak mahasiswa lain untuk berumbuk bersama siapa calon ketua BEMAF yang akan dimenangkan saat berlangsungnya Musyawarah Bersama (MUBES) dengan kesepakatan apabila calon ketua yang dimenangkan mau memberikan satu kursi pemerintahan untuk mahasiswa yang akan diusungkan menjadi sekjen BEMAF.[111] Pada tahun 2010 juga terjadi kasus yang sama saat pemilihan ketua BEMAF. Adanya perbedaan pendapat dan tekhnik pemilihan yang diterapkan oleh dua kelompok mahasiswa yang ingin memenangkan calon masing-masing yang telah di ajukan dari masing-masing jurusan. Namun pada kasus ini, suara yang terkumpul saat musyawarah bersama adalah dari pihak yang menjalankan sistem politik islam yang beraliansi dari kader PKS atau aktivis Lembaga Dakwah Kampus, sehingga kelompok yang kontra dengan jalur ini merasa kurang puas dan berakhir pada ketidak harmonisan komunikasi antar jurusan.[112]

---

[110] Wawancara dengan Fadila Abd (Tarbiyah: aktivis Forbesma), Universitas Isalam Negeri, Banda Aceh, 16 Juli 2014 pukul 11.35

[111] Wawancara dengan AM (nama disamarkan, Ushuluddin), Universitas Isalam Negeri, Banda Aceh, 16 Juli 2014 pukul 12.45

[112] Wawancara dengan Fadila Abd (Tarbiyah: aktivis Forbesma), Universitas Isalam Negeri, Banda Aceh, 16 Juli 2014 pukul 11.35

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Partai politik adalah sebuah organisasi yang mempunyai tujuan untuk membawa pemimpin berkuasa dan mewujudkan cita-cita rakyat. Di Indonesia tercatat bahwa partai politik telah dibagi menjadi dua bahagian yaitu partai nasional dan partai lokal. Partai nasional adalah partai yang mencakup pada semua daerah wilayah seluruh Indonesia, sedangkan partai lokal hanya ada di wilayah tertentu. Bagi mahasiswa partai politik adalah wadah penyampaian aspirasi rakyat dan wadah untuk mendalami ilmu kepemimpinan. Maka dengan terbentuknya partai Politik Lokal di Aceh memberi peluang bagi mahasiswa untuk menjadi aktivis partai. Dalam partai politik juga karakteristik mahasiswa dibentuk untuk menjadi pemimpin yang baik. Namun ada beberapa mahasiswa yang tidak mampu menyeimbangi ideologi partai dan ideologi kampus sehingga sering terjadinya konflik dlm politik kampus saat pelaksanaan pemilihan pemimin mahasiswa.

Mahasiswa dikenal dengan lapisan masyarakat yang terdidik dan mempunyai tingkatan emosional kematangan berfikir sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya. Sebagai lapisan masyarakat yang Independen, mahasiswa mampu melakukan perubahan dan mewakili aspirasi rakyat. Namun yang disayangkan adalah, beberapa mahasiswa yang telah menjadi bagian dari pada suatu partai tidak lagi Independen dan akan hilangnya rasa Idealisme mahasiswa karena telah tertanan ideologi suatu partai.

Adanya perpolitikan praktis pada mahasiswa dipengaruhi oleh adanya edukasi politik yang dibawa kedalam kampus melalui lembaga-lembaga organisasi kampus seperti : Himpunan

Mahasiswa Kampus (HMJ), (Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMAF), Lembaga Dakwah Kampus (LKD), dll. Selain itu mahasiswa yang aktif dengan organisasi ex-kampus seperti KAMMI, PII, FORBESMA yang juga telah terhipnotis dengan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh elitisi partai sehingga mahasiswa mudah bergabung dengan suatu partai.

B. Saran

Kepada seluruh mahasiswa UIN Ar Raniry baik yang yang aktif dalam organisasi kampus maupun ex-kampus agar tidak mudah terpengaruhi dengan kebijakan-kebijakan yang dipaparkan oleh elitisi Politik partai. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa mahasiswa adalah wakilan dari masyarakat untuk memberikan solusi, pendapat, dan menciptakan keharmonisan dengan sesama masyarakat lain dengan tidak pandang bulu dan mengenal perbedaan. Sebagai mahasiswa yang berkualitas yang mampu mengembangkan eksitensi kampus dan universitas haruslah idealis dan bersifat independen. Menjadi bagian daripada penggalang calon keanggotaan partai bukanlah sebuah masalah untuk mahasiswa yang ingin berkiprah dalam dunia politik. Namun Ideologi kampus tetaplah harus dipertahankan dan dapat dijalankan sebagaimana mestinya selama berstatus sebagai mahasiswa.

Peneliti menyadari bahwa penulisan hasil penelitian dalam bentuk skripsi masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu peneliti harapkan adanya kritikan dan saran dari pada pembaca khususnya untuk perbaikan skripsi menjadi lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Aguswandi, *Rekonfigurasi Politik: Proses Perdamaian Aceh,* (London: Conciliation Resources, 2008).

Ajmi Kontras Aceh, *Jurnal Activists Propose Model For Aceh.* (Tabel data kasus kekerasan yang pernah dilaporkan ke komnas HAM (Demi Kebenaran dan Keadilan Aceh). 2007).

Ali Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

Alwahadi Ilyas, *Aceh Serambi Mekkah*, (Banda Aceh, Pemerintah Prov NAD: 2008).

Amir Hendarsyah, Buku *Pintar Politik : Sejarah, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan,* (Jogja: Redaksi Great Publlisher, 2009).

Amran Zamzami SE, *Jihad Akbar di Medan Area*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990).

Apridor, *Tsunami Aceh Azab atau Bencana*, (Jakarta Timur. Al-Kausar: 2005).

Basri M Nur, *Parnas vs Parlok: Pertarungan Partai Politik dalam Menguasai Aceh*, (Banda Aceh: GAMNA Publishing, 2014).

Bob Sugeng Hadiwinata dkk, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka: Dari Kotak Peluru ke Kotak Suara*, (Jakarta Selatan: Friedrich Ebert Stiftung, 2010).

CISAH. *Tinggalan Sejarah Samudra Pasai*, (Lhokseumawe, 2014).

Dra. Hj. Emi Suhaimai, *Wanita Aceh dalam Pemerintahan dan Peperangan*, (Banda Aceh: CV. Gua Hira, 1993).

H. Uka Tjandrasasmita, *Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia*, (Bogor, 2007).

John T Ishiyama, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu Jilid I*, (Jakarta: Kencana. 2013).

Kivlan Zen, *Konflik dan Integrasi TNI-AD*, (Jakarta: Institusi for Policy Studies, 2004).

Muhammad Umar, *Darah dan Jiwa Aceh Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2002).

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Aceh Serambi Mekkah*, (Banda Aceh: CV. Citra Kreasi Utama, 2008).

Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA, *Panduan Program S-1 dan D-3 IAIN Ar Raniry* (Banda Aceh: 2010).

Prof. Firmanzah, Ph. D, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

SH Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latar belakang politik dan masa depannya*, (Jakarta: PT. Citra Panca Serangkai, 1993).

Teungku Jakobi AK, *Aceh Daerah Modal: Long March ke Medan Area*, (Jakarta: Selawah RI-001. 1992).

Teuku Zulkhairi, *Suara Rakyat Aceh*, (Banda Aceh: Gamma).

Peraturan Undang-Undang dan MoU

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik bab IV yang membahas tentang fungsi, hak, dan kewajiban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Bab 1 ketentuan Umum, Pasal 1 angka 18

Nota Kesepahaman Damai Helsinki.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nur Azmiaty
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Utara, 06 January 1992
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status Perkawinan : Belum Kawin
5. Agama : Islam
6. Kewargaan Negara/ Suku : Indonesia/ Aceh
7. Email : azmibianca@gmail.com
8. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Ar-RaniryDarussalam Banda Aceh
9. Alamat Sekarang : Desa Jurong Peujeura, Lambaro Aceh Besar
10. Nama Orang Tua/ Wali
    a. Ayah : Mustafa Puteh, S. Pd
    b. Pekerjaan : PNS
    c. Ibu : Ti Hasanah
    d. Pekerjaan : IRT
11. Riwayat Pendidikan
    a. SD Lampeuneurut Tahun Lulus 2004
    b. MTSs Darul Ulum Tahun lulus 2007
    c. MAs Ruhul Islam Anak Bangsa Tahun lulus 2010
    d. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Darussalam Tahun lulus 2014
12. Pengalaman Organisasi
    1. Pengurus BEMAF Ushuluddin Periode 2011-2012
    2. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banda Aceh 2012